Selanjutnya guna mengoperasional arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 dituangkan melalui program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah ditahun 2022 dengan berpedoman pada target dan sasaran pembangunan sebagimana yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. adapun kebijakan umum dan prioritas program pembangunan daerah RKPD kabupaten luwu timur tahun 2022 disajikan pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4. 8 Kebijakan Umum Dan Prioritas Program Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

			Misi/Tujuan/Sasaran/Progr	Indikator Kinerja		aian Kinerja gram	Perangkat Daerah
Ko	de		am Pembangunan	(Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	Tahun- 2022	Penanggungjawab
1			Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)				
1	1		Meningkatkan kualitas hidup masyarakat (T1)	PDRB/kapita (Rp (juta))	70.9	71.45	
1	1	1	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat (S1)	Angka kemiskinan (Persen)	6.84	6.64	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah ketersediaan pangan utama setara pangan pokok ((Ton))	245,426	205,774	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan (lokasi)	6	6	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah lokasi yang rawan dan rentan pangan yang intervensi (lokasi)	0	3	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pegawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	0	100	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Pengembangan Objek Pariwisata (Persen)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Persen)	95	95	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pembinaan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Persen)	95	95	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok ('%)	13	12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

			N: : T : (0 / D			aian Kinerja	Borongkot Dooroh
Ko	de		Misi/Tujuan/Sasaran/Progr am Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun-	gram Tahun-	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	Persentase UTTP yang bertanda tera sah ('%)	2021 90	90	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin ('%)	5.56	6.08	MENENGAH DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Usaha Industri yang terdata dalam SIINAS ('%)	100	100	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penetapan Kawasan Transmigran ('%)	100	100	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)	340	120	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ('%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	1	2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (S2)	Indeks Pembangunan Manusia (Persen)	73.5	73.8	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ('%)	46.51	46.91	
				Angka Partisipasi Masyarakat putus/belum sekolah pada Lembaga Pendidikan non formal ('%)	54.56	54.58	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI ('%)	103.23	103.33	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs ('%)	103.57	103.58	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk ('%)	0.02	0.02	DINAS KESEHATAN
				Angka kematian ibu (per 100000 KH)	126.17	108.14	RESERATAN
				Angka kematian Bayi (per 1000 KH)	8.11	7.93]
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%) ('%)	80.86	81.66	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan ('%)	68	70	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa)	127	127	DINAS KESEHATAN

				aian Kinerja	Barranderi Barrad	
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Progr am Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun-	gram Tahun-	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
	DDOOD AM DEMENULIAN		2021	2022	55 51	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan ('%)	30	36	RSUD I LAGALIGO	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDMK ('%)	0	100	RSUD I LAGALIGO	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang diberikan bantuan sosial ('%)	36.52	40.23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani (%) ('%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang tertangani ('%)	41.23	44.93	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial ('%)	22.38	22.41	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase korban bencana yang ditangani ('%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit) ('%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase OPD yang memenuhi indikator 7 prasyarat PUG ('%)	90	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu ('%)	72.73	81.82	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Ratio layanan pembelajaran keluarga ('%)	0.14	0.14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota ('%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi ('%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

			Misi/Tujuan/Sasaran/Progr	Indikator Kinerja		paian Kinerja gram	Perangkat Daerah
Ko	de		am Pembangunan	(Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	Tahun- 2022	Penanggungjawab
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO ('%)	0	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa ('%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (OPD) (Nilai)	4	4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern conraceptive prevalance rate/mCPR) (persen)	65	66	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai)	35.02	35.52	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan (Persen)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaag (Persn)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase gugus depan yang aktif (persen)	95	95	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemustaka ('%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (%) (Persentase)	95	95	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2			Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas(M2)				
2	2	2	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah secara merata (T2)	Rasio Gini (Persen)	0.38	0.28	
2	2	3	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah (S3)	Laju Pertumbuhan ekonomi (Persen)	1.50	2.50	
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang terbit izin usaha simpan pinjam koperasi ('%)	0	2.5	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran/Progr	Indikator Kinerja		aian Kinerja gram	Perangkat Daerah
Kode	!	am Pembangunan	(Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	Tahun- 2022	Penanggungjawab
						USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas ('%)	60.24	41.25	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi ('%)	50.72	53.25	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan ("%)	13.15	21.2	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi ('%)	0	2.15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha ('%)	3.37	3.8	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan skala usaha mikro ('%)	1.13	1.83	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Tangkap (Ton)	100,659.0 0	101,659.0 0	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	310,800.0 0	315,565.0 0	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan- perundangan yang berlaku (Persen)	92	94	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan (Ton)	312	322	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	presentase dan sarana pertanian yang dibangun ('%)	100	100	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Layanan Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian ('%)	100	100	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner ('%)	100	100	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase pengendalian dan penanggulanagn bencana pertanian ('%)	100	100	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				DINAS PERTANIAN

			Misi/Tujuan/Sasaran/Progr	Indikator Kinerja		aian Kinerja gram	Perangkat Daerah
Ko	ode		am Pembangunan	(Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	Tahun- 2022	Penanggungjawab
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	presentase penyuluhan yang meningkat kapasitasnya ('%)	100	100	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat yang dimanfaatkan ('%)	90	90	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah ekspor perdagangan (Ton)	76,000.00	78,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan (Kawasan)	1	1	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2	2	4	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha (S4)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3.8	3.3	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Orang)	158,500.0 0	158,900.0 0	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi ('%)	75.75	75.75	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) ('%)	70.48	70.98	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun ('%)	22.82	22.82	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional (Angka)	35	40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase rencana Investasi Penanaman Modal ('%)	15	20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ('%)	75	80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3			Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)				
3	3		Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah (T3)	Indeks daya saing infrastruktur daerah (indeks)	0	0	
3	3	5	Meningkatnya daya guna	indeks kepuasan layanan	Memuaska	Memuaska	

		Misi/Tujuan/Sasaran/Prog	r Indikator Kinerja		paian Kinerja gram	Perangkat Daerah
Ko	de	am Pembangunan	(Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	Tahun- 2022	Penanggungjawab
		dan hasil guna infrastruktu daerah (S5)	r infrastruktur (Predikat)	n	n	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	R Rasio jaringan irigasi ('%)	7.98	8.41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi ('%)	60.13	62.59	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik ('%)	0	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten kondisi baik ('%)	41.14	42.04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi ('%)	31.37	41.89	DINAS PEKERJAAN
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tampa kecelakaan kerja ('%)	100	100	UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rata rata penyelenggaraan penataan ruang ('%)	75	78	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni ('%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
			Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang ('%)	100	100	DAN PERTANAHAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah	24.94	43.88	DINAS PERUMAHAN,

			Mini/Tuiuon/Congrey/Drogr	Indikator Kinaria		aian Kinerja	Perangkat Daerah Penanggungjawab KAWASAN PERMUKIMAN
Ko	de		Misi/Tujuan/Sasaran/Progr am Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	gram Tahun- 2022	
				10 ha yang ditangani ('%)	2021	2022	
				Rasio rumah layak huni ()	18.04	18.34	DAN PERTANAHAN
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani ('%)	2.81	2.89	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU ('%)	21.05	42.1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda ('%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Angkutan Yang Layak ('%)	0.72	0.73	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Yang disediakan ('%)	41.8	64.88	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kecelakaan Kapal angkutan di Danau dan sungai ('%)	1.35	1.35	DINAS
				Persentase Kecelakaan Kapal angkutan di laut ('%)	0.07	0.07	- PERHUBUNGAN
4			Menjaga ketahanan lingkungan hidup (T4)	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Persen)	0	0	
4	4	6	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S6)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (Persen)	87	87.55	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan ('%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi ('%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat ('%)	39.85	40.15	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

			Misi/Tujuan/Sasaran/Progr	Indikator Kinerja		aian Kinerja gram	Perangkat Daerah
Ko	de		am Pembangunan	(Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	Tahun- 2022	Penanggungjawab
					2021	2022	DAN PERTANAHAN
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan (Persen)	0	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (Persen)	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang tertangani dengan baik (Persen)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi (Persen)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (Persen)	50	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (Jumlah MHA)	3	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang dibina (Persen)	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima (Persen)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan (Persen)	50	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)	70	70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4			Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M4)				
4	5		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T5)	Indeks reformasi birokrasi (IRB) (Persen)	0	0	
4	5	7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S7)	Nilai SAKIP Daerah (Peredikat)	WTP	WTP	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

	Misi/Tujuan/Sasaran/Progr	Indikator Kinaria		aian Kinerja gram	Perangkat Daerah
Kode	am Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	Tahun- 2022	Penanggungjawab
	KABUPATEN/KOTA		2021	2022	SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota ('%)	95	95.3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	92	94	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	95	95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota ('%)	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	AU CT CO CD			aian Kinerja		
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Progr am Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Prog Tahun-	gram Tahun-	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
	am r ombanganan	(· ajaa. vpaov o atooo)	2021	2022	. onanggangjanas	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota ('%)	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS PERTANIAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	95	95	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	INSPEKTORAT	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	RSUD I LAGALIGO	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	SEKRETARIAT DAERAH	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	SEKRETARIAT DPRD	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	ANGKONA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	BURAU	

	Mini/Tuiven/Conserve/Dress	la dilector Minoria		aian Kinerja	Perangkat Daerah	
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Progr am Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun-	gram Tahun-	Penanggungjawab	
		` '	2021	2022	55 51	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	KALAENA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	MALILI	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	MANGKUTANA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	NUHA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	TOMONI	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	TOMONI TIMUR	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	WASUPONDA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	woтu	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	TOWUTI	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pelaksanaan kegiatan kebijakan perekonomian ('%)	50	55	SEKRETARIAT DAERAH	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan perda Yang Difasilitasi ('%)	80	83	SEKRETARIAT DPRD	

	K. d.		Misi/Tujuan/Sasaran/Progr	Indikator Kinerja		aian Kinerja gram	Perangkat Daerah	
Ko	ode		am Pembangunan	(Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	Tahun- 2022	Penanggungjawab	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Persen)	96.5	96.7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (Perangkat Daerah)	90	90	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah ('%)	97.2	97.5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Aparatur (%) (Persentase)	90	90	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				INSPEKTORAT	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				INSPEKTORAT	
4	5	8	Meningkatnya kualitas pelayanan public (S8)	IKM Pelayanan SPM (Persen)	0	0		
				IKM Pelayanan perizinan dan non perizinan (Persen)	80.15	82.21		
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan (persentase)	99.06	99.22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (persentase)	85.85	86.31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ('%)	65	75	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Profil Kependudukan ('%)	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Yang baik penataan desanya ('%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib administrasi ('%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola (persen (%))	80	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah (persen ('%))	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

	Migi/Tujuan/Sagaran/Drogr	Indikator Kinaria		aian Kinerja gram	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Progr am Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	Tahun- 2022		
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Kinerja program Pelayanan Penanaman Modal ('%)	100	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid (Angka)	1	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (persen ('%))	90	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan (persen ('%))	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku ('%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan ('%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Presentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup ('%)	0	25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Besaran Rekomendasi Izin Usaha Industri yang dihasilkan ('%)	10	10	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan ('%)	80	80	SEKRETARIAT DAERAH	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik ('%)	100	100	ANGKONA	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam	100	100	ANGKONA	

	Misi/Tujuan/Sasaran/Progr	Indikator Kinerja		aian Kinerja gram	Perangkat Daerah	
Kode	am Pembangunan	(Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	Tahun- 2022	Penanggungjawab	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi,Fasilitasi,Konsult asi dan Supervisi Pembangunan Daerah ('%)	2021	2022		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (°%)	100	100	ANGKONA	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100	100	ANGKONA	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	BURAU	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah ('%)	100	100	BURAU	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	BURAU	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100	100	BURAU	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik ('%)	100	100	MALILI	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi,Fasilitasi,Konsult asi dan Supervisi Pembangunan Daerah ('%)	100	100	MALILI	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	MALILI	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100	100	MALILI	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	MANGKUTANA	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah ('%)	100	100	MANGKUTANA	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100	100	MANGKUTANA	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan	100	100	MANGKUTANA	

	Misi/Tujuan/Sasaran/Progr	Indikator Kinerja		aian Kinerja gram	Perangkat Daerah	
Kode	am Pembangunan	(Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun-	Tahun-	Penanggungjawab	
		ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	2021	2022		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)	100	100	NUHA	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi,Fasilitasi,Konsult asi dan Supervisi Pembangunan Daerah ('%)	100	100	NUHA	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100	100	NUHA	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100	100	NUHA	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik ('%)	100	100	TOMONI	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah ('%)	100	100	TOMONI	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	TOMONI	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (°%)	100	100	TOMONI TIMUR	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah ('%)	100	100	TOMONI TIMUR	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	TOMONI TIMUR	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100	100	TOMONI TIMUR	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik ('%)	100	100	WASUPONDA	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah ('%)	100	100	WASUPONDA	

	IZ- I		Misi/Tujuan/Sasaran/Progr	Indikator Kinerja		aian Kinerja gram	Perangkat Daerah	
Ko	de		am Pembangunan	(Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	Tahun- 2022	Penanggungjawab	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100	100	WASUPONDA	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100	100	WASUPONDA	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik ('%)	100	100	wотu	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah ('%)	100	100	wотu	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100	100	WOTU	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100	100	woтu	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	TOWUTI	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi,Fasilitasi,Konsult asi dan Supervisi Pembangunan Daerah ('%)	100	100	TOWUTI	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100	100	TOWUTI	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100	100	TOWUTI	
5			Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat(M5)					
5	6		Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T6)	Angka kriminalitas (Persen)	0	0		
5	6	9	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S9)	Nilai Kepuasan Masyarakat atas Kondisi Keamanan dan Ketertiban (Persen)	0	0		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan dasar penanggulangan bencana ('%)	33.54	33.57	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada tahun berjalan (kasus)	50	45	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

., .	Misi/Tujuan/Sasaran/Progr	Indikator Kinerja		aian Kinerja gram	Perangkat Daerah
Kode	am Pembangunan	(Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	Tahun- 2022	Penanggungjawab
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah kegiatan yang terlaksana pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Kegiatan)	120	120	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi ('%)	0	100	ANGKONA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi ('%)	100	100	BURAU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi ('%)	100	100	MALILI
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi ('%)	0	100	MANGKUTANA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi ('%)	100	100	NUHA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi ('%)	100	100	TOMONI TIMUR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi ('%)	100	100	WASUPONDA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi ('%)	100	100	WOTU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi ('%)	0	100	TOWUTI
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan ('%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi ('%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial ('%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)				

K o	Kode		Misi/Tujuan/Sasaran/Progr			aian Kinerja gram	Perangkat Daerah
N.C			am Pembangunan	(Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun- 2021	Tahun- 2022	Penanggungjawab
6	7		Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya (T7)	Cakupan penerapan nilai agama dan budaya dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari (Persen)	0	0	
6	7	1	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan	Indeks kerukunan umat beragama (Persen)	7		
0	0 budaya sebagai landasan		budaya sebagai landasan pembangunan (S10)	Indeks pembangunan kebudayaan (Persen)	0	0	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Seni dan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan (Persen)	80	85	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Seni dan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan (Persen)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan (Persen)	45.33	43.75	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sumber: Rancangan RPJMD Kab. Luwu Timur 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321429 Email : dishubluwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nornor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
- 11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/TAHUN 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/TAHUN 2022, tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Menunjuk/mengangkat PPTK di lingkungan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:
- mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
- 2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- 3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimaa mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di

: Malili

Pada tanggal

: 05 Januari 2022

KEPALA DINASTAH KAS

GUNA ANGGARAN,

Pembin Utama Muda, IV/c Pangkat Nip 19651105 198703 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bupati Luwu Timur di Malili;

Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;

Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;

Yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Daftar Nama PPTK	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Nama : Sri Dewita Elim, ST NIP : 198803262014042001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Pangkat/Gol.: Penata Muda Tk. I, III/b Jabatan : Kasubag Perencanaan dan	Perencanaan, Penganggaran dan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Kepegawaian	Evaluasi Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PPTK
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
		Administrasi Kepegawaian	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
2.	Nama : Asnita, Sari, SE	Adminitrasi Keuangan Perangkat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pangkat/Gol.: Penata Tk. I, III/d		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PPTK
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	
	atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Anythomastessaleida
		The state of the s

3.	Nama : Untung Pitoyo, SH NIP : 197507052005021003	Pengadaaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesinnya Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	
	Pangkat/Gol.: Penata Tk. I, III/b Jabatan : Kasi Manajemen Keselamatan Transportasi dan Rekayasa Lalu		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	PPTK
	Lintas	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Pelaksanaan Manajemen dan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung	
		Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/Kota	PPTK
	Ţ.		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota	
		Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	
4.	Nama : Burhanuddin, SH NIP : 196708122007011030 Pangkat/Gol.: Penata, III/c Jabatan : Kasi Lalu Lintas dan Angkutan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	
	Jabatan : Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraaan Bermotor	PPTK
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kab/Kota	

5.	Nama : Andi Muhammad Najib Qasim, S Sos NIP : 196709061995031002 Pangkat/Gol.: Penata Tk. I, III/d Jabatan : Kasi Kepelabuhanan, Keselamatan Angkuta Laut dan Pengamanan Wilayah Perairan	Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha Yang Berdomosili dan Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kab/Kota	РРТК
6.	Nama : Atris, SH NIP : 196808182007011022 Pangkat/Gol.: Penata, III/c Jabatan : Kasi Pengawasan Lalu Lintas dan Penyebrangan	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perorangan Warga Indonesia atau Badan Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai Dengan Domisili Orang perorangan Warga negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kab/Kota	PPTK
7.	Nama : Thomas Agustinus, S. Hut NIP : 198308082005021001 Pangkat/Gol.: Penata, III/c Jabatan : Kasi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Danau	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasioan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	РРТК
8.	Nama : Suwarny Yahya, ST NIP : 19811120 2014102 001 Pangkat/Gol.: Penata, III/c Jabatan : Kasi Perhubungan Udara	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Gedung Terminal (Tarengge) Pembangunan Gedung Terminal (Malili)	РРТК

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal: 05 Januari 2022

KEPALA DINAS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

A.R. SALIM, S. Sos. MM
Pangkat Pembin Utama Muda, IV/c
Nip : 19651105 198703 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Soekarno-Hatta No. Malili 92981 Telp. (0474) 321634 fax (0474)321634 Website: http://dpkpp.luwutimurkab.go.id/ Email: dpkpp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR: 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), TENAGA TEKNIS KEGIATAN DAN TENAGA ADMINISTRASI LINGKUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- Menimbang: 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Tenaga Teknis Kegiatan dan Tenaga Administrasi dengan Surat Keputusan;
 - 2. berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Butir I.G.1 menegaskan bahwa PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK dan Butir I.E.9 menegaskan bahwa PA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Tenaga Teknis Kegiatan dan Tenaga Administrasi:

3. berdasarkan point 1 (satu) dan 2 (dua), maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
 - 8. Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 34);

- Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia masing-masing dengan Nomor: 027/2929/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 80);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 /F-04/ I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04/ I/ TAHUN 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022;
- 14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 51 / F-04 / I / Tahun 2022 Taggal 5 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), TENAGA TEKNIS KEGIATAN DAN TENAGA ADMINISTRASI

KESATU

: Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang tercantum namanya pada Lampiran I dan Lampiran II lajur 2, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tenaga Teknis Kegiatan dan Tenaga Administrasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022:

KEDUA

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, membantu tugas dan kewenangan PA/KPA meliputi:
 - 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
- melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Unit SKPD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal:

- 1. menyusun perencanaan pengadaan;
- 2. pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- menyusun penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 4. menyusun penetapan rancangan kontrak;
- 5. menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- menyusun besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- 7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- menyusun pelaksanaan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- melaksanakan pengendalian kontrak;
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 13. menilai kinerja penyedia.

KEEMPAT

- Dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, Tenaga Teknis Kegiatan pada Unit SKPD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, mempunyai tugas membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal:
- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pengadaan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- menyiapkan bahan penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- menyiapkan bahan penyusunan penetapan rancangan kontrak;
- menyiapkan bahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 6. menyiapkan bahan penyusunan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- menyiapkan bahan pengusulan perubahan jadwal kegiatan;
- 8. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kontrak;
- menyiapkan wadah untuk menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- menyiapkan bahan penyerahan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 13. menyiapkan bahan penilaian kinerja penyedia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Tenaga Teknis Kegiatan dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Administrasi.

KELIMA

: Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur APBD Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 7 Januari 2022

PIt. KEPALA DINAS,

Selaku Pengguna Anggaran

ANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP: 19740323 200312 1 004

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;

2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Luwu Timur di Malili;

4. Kepala BPKD Kabupaten Luwu Timur di Malili;

5. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN TENAGA TEKNIS

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PPTK	JABATAN PADA INSTANSI	PAGU ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
			72,424,350.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		KASUBAG	10,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	HALIJAH JAMARUDDIN, S.Si	KEPEGAWAIAN & PERENCANAAN	3,864,350.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
			3,825,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			54,735,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2,622,316,662.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	DARMAWATI, S.AN	KASUBAG UMUM	2,587,919,922.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	DAKIMAWAII, BAII	& KEUANGAN	34,396,740.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	DARMAWATI, S.AN	KASUBAG UMUM	19,400,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3		MAWATI, SIAN & KEUANGAN	19,400,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	DARMAWATI, S.AN	KASUBAG UMUM	7,799,780.00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
		& KEUANGAN	7,799,780.00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
		WAGNEDAG.	135,260,723.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	HALIJAH JAMARUDDIN, S.Si	I KEPEGAWAIAN &	24,660,723.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Ornaraco D Dire, D. Di	PERENCANAAN	110,600,000.00	Rimbingon Telenia Implementaci Peraturan
		VACUDAC LIMUM	374,889,100.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	DARMAWATI, S.AN	& KEUANGAN	4,054,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	ANDI WIJA HASAN,ST	KEPALA DINAS	49,250,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	THIOT WIGHT THEOLIN, OT		1,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			9,003,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			6,000,100.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8	DARMAWATI, S.AN	KASUBAG UMUM & KEUANGAN	7,680,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			9,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu
			288,902,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

			21 3441 4441	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerah
9	andi wija hasan, st	KEPALA DINAS	6,500,000.00	Pengadaan Mebel
			15,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedun Kantor atau Bangunan Lainnya
10	DARMAWATI, S.AN	KASUBAG UMUM & KEUANGAN	177 70X SZX (BI)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusa: Pemerintahan Daerah
			3,008,420.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			54,600,108.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik
			114,600,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11	DARMAWATI, S.AN	KASUBAG UMUM & KEUANGAN	147,190,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daera Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			51,200,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biay Pemeliharaan dan Pajak Kendaraa Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
			50,990,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			45,000,000.00	Dangunan Lamiya
12	IWAN SETIAWAN, ST.	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	58,761,300.00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokas Program Kabupaten/Kota
			41,319,300.00	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawa Bencana atau Terkena Relokasi Progra Kabupaten/Kota
			17,442,000.00	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyaraka Rumah Susun dan Rumah Khusus
	IWAN SETIAWAN, ST.	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	250,000,000.00	Pembangunan dan Rehabilitasi Ruma Korban Bencana atau Relokasi Progra Kabupaten/Kota
			50,000,000.00	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
13			100,000,000.00	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			100,000,000.00	Pembangunan Rumah Khusus beserta PS bagi Korban Bencana atau Relokasi Progra Kabupaten/Kota
	IWAN SETIAWAN, ST.	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	179,220,000.00	Dombinson Dongolology Dumoh Sugr
14			179,220,000.00	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susi
15	IWAN SETIAWAN, ST.	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	185,969,800.00	Donorhitan Izin Pembangunan di
			25,620,000.00	Koordinasi dan Sinkroniasi Pengendalis
16	ICHSAN, ST	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MUDA	25,000,000.00	Koordinasi dan Sinkroniasi Pengendali Pembangunan dan Pengembangan Kawas Permukiman dan Permukiman Kumuh
17	ICHSAN, ST	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MUDA	39,850,000.00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
18	ANDI MAKKASAU, ST	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MUDA	12,000,000.00	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utili Umum di Perumahan untuk Menunjang Fun Hunian

19	I KOMANG ARDIANA, ST	AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN	41,234,675.00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			41,234,675.00	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
20	REYNAL RUSTAM, SE	AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN	5,647,068,675.00	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			261,998,675.00	Penetapan Daftar masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
21	I KOMANG ARDIANA, ST	AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN	69,123,900.00	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
			37,123,900.00	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
22	REYNAL RUSTAM, SE	AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN	13,748,025.00	Penerbitan Izin Membuka Tanah
			13,748,025.00	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
23	REYNAL RUSTAM, SE	AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN	473,573,873.00	dalam satu Dacian nabupaten/nota
			473,573,873.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Malili, 7 Januari 2022

PIt. KEPALA DINAS

ANDI WIJA HASAN, ST

Pkt: Pembina Tk.I

NIP. 19740323 200312 1 004

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PPTK, TENAGA TEKNIS DAN TENAGA ADMINISTRASI PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN LUWU TIMUR

PENETAPAN PPTK, TENAGA TEKNIS DAN TENAGA ADMINISTRASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PPTK	NAMA TENAGA TEKNIS	NAMA TENAGA ADMINISTRASI	KEGIATAN / URAIAN PEKERJAAN
1	2	3	4	5
A				Kecamatan Burau
				APBD Pokok
1	Andi Makkasau, ST	I Komang Ardiana, ST	Abdul Rachmat Azis	Pengkerikilan Jalan Tani Paese 2 Lumbewe Desa Lumbewe Kec. Burau Biaya Desain Pengkerikilan Jalan Tani Paese 2 Lumbewe Desa Lumbewe Kec. Burau Biaya Supervisi Pengkerikilan Jalan Tani Paese 2 Lumbewe Desa Lumbewe Kec. Burau Biaya Administrasi Pengkerikilan Jalan Tani Paese 2 Lumbewe Desa Lumbewe Kec. Burau
В				Kecamatan Wotu
				APBD Pokok
				Pembangunan Drainase Dusun Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu
2	Andi Makkasau, ST	I Komang Ardiana, ST	Abdul Rachmat Azis	Biaya Desain Pembangunan Drainase Dusun Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Dusun Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Dusun Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu
C				Kecamatan Tomoni Timur
				APBD Pokok
3	Andi Makkasau, ST	I Komang Ardiana, ST	Abdul Rachmat Azis	Pengerasan Jalan Pekuburan Dusun Boku Desa Pattengko Kec. Tomoni Timur Biaya Desain Pengerasan Jalan Pekuburan Dusun Boku Desa Pattengko Kec. Tomoni Timur Biaya Supervisi Pengerasan Jalan Pekuburan Dusun Boku Desa Pattengko Kec. Tomoni Timur Biaya Administrasi Pengerasan Jalan Pekuburan Dusun Boku Desa Pattengko Kec. Tomoni Timur
4	Andi Makkasau, ST	Nurhalis, ST	Linda, ST	Pembangunan Proteksi Jalan Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko Kec. Tomoni Timur Biaya Desain Pembangunan Proteksi Jalan Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko Kec. Tomoni Timur Biaya Supervisi Pembangunan Proteksi Jalan Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko Kec. Tomoni Timur Biaya Administrasi Pembangunan Proteksi Jalan Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko Kec. Tomoni Timur
D				Kecamatan Angkona
-				APBD Pokok
				Pengerasan Jalan Angkona Desa Tampinna Kec. Angkona
		Nurhalis, ST	Linda, ST	Biaya Desain Pengerasan Jalan Angkona Desa Tampinna Kec. Angkona
5	Ichsan, ST			Biaya Supervisi Pengerasan Jalan Angkona Desa Tampinna Kec. Angkona
				Biaya Administrasi Pengerasan Jalan Angkona Desa Tampinna Kec. Angkona

E				Kecamatan Towuti
				APBD Pokok
6	Ichsan, ST	Emilda Lande, ST	Andi Irianti Jaya, ST	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Pantai Sioune Desa Pekaloa Kec. Towuti Biaya Desain Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Pantai Sioune Desa Pekaloa Kec. Towuti Biaya Supervisi Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Pantai Sioune Desa Pekaloa Kec. Towuti Biaya Administrasi Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Pantai Sioune Desa Pekaloa Kec. Towuti
7	Ichsan, ST	David Ferdi, ST	Andi Irianti Jaya, ST	Pembangunan Jalan Lingkungan Depan Masjid Al Muhajirin Desa Pekaloa Kec. Towuti Biaya Desain Pembangunan Jalan Lingkungan Depan Masjid Al Muhajirin Desa Pekaloa Kec. Towuti Biaya Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan Depan Masjid Al Muhajirin Desa Pekaloa Kec. Towuti Biaya Administrasi Pembangunan Jalan Lingkungan Depan Masjid Al Muhajirin Desa Pekaloa Kec. Towuti
8	Ichsan, ST	David Ferdi, ST	Andi Irianti Jaya, ST	Peningkatan Jalan Lingkungan Arah Pekuburan Desa Pekaloa Kec. Towuti Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Arah Pekuburan Desa Pekaloa Kec. Towuti Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Arah Pekuburan Desa Pekaloa Kec. Towuti Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Arah Pekuburan Desa Pekaloa Kec. Towuti
9	Ichsan, ST	Emilda Lande, ST	Andi Irianti Jaya, ST	Pembangunan Drainase Jalan Pantai Sione Desa Pekaloa Kec. Towuti Biaya Desain Pembangunan Drainase Jalan Pantai Sione Desa Pekaloa Kec. Towuti Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Jalan Pantai Sione Desa Pekaloa Kec. Towuti Riaya Administrasi Pembangunan Drainase Jalan Pantai Sione Desa Pekaloa Kec. Towuti
F				Kabupaten Luwu Timur (Tersebar)
10	Andi Makkasau, ST		Linda, ST	Penyusunan Master Plan (DED) Kawasan Kumuh Biaya Administrasi Penyusunan Master Plan (DED) Kawasan Kumuh
11	Ichsan, ST		Andi Irianti Jaya, ST	Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)
12	Andi Makkasau, ST	I Komang Ardiana, ST	Andi Irianti Jaya, ST	Pembangunan Fasilitas Umum Kawasan Kumuh Biaya Supervisi Pembangunan Fasilitas Umum Kawasan Kumuh
	Andi Makkasau, ST		Linda, ST	Biaya Administrasi Pembangunan Fasilitas Umum Kawasan Kumuh Pembangunan Fasilitas umum Perumahan Nelayan Biaya Desain Pembangunan Fasilitas umum Perumahan Nelayan
13		Emilda Lande, ST		Biaya Supervisi Pembangunan Fasilitas umum Perumahan Nelayan Biaya Administrasi Pembangunan Fasilitas umum Perumahan Nelayan

Malili, 7 Januari 2022 PLT. KEPALA DINAS

ANDI WIJA HASAN, ST. Pangkat : Pembina Tk. I NIP.: 19740323 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435

MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR: 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR **TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu menunjuk kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 90);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- 15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

r d

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut pada lampiran I dan II _DUA

- : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangka Daerah (PPTK-SKPD) sebagai berikut :
 - Melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun Anggarai berjalan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaal kegiatan;
 - d. Bertanggungjawab atas pemanfaatan anggaran dengan kegiatai sesual dokumen perencanaan.

KETIGA

- : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daeral (PPK-SKPD) sebagai berikut :
 - Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampalkan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetuju oleh PPTK;
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dar tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesua dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menylapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD dan;
 - g. Menylapkan Laporan Keuangan SKPD;

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan in dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupater Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupater Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

10

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuar apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akar diadakan perbalkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Malili Pada tanggal 3 Januari 2022

PIL KEPALA BADAN,

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip: 19700814 200212 1 006

Tembusan Yth.:

- Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
- Wakii Bupati Luwu Timur di Malili;
- Ketua DPRD Kab, Luwu Timur di Malili;
- Sekretaris Daerah Kab, Luwu Timur di Maiili;
- Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- Kepala Bapelitbangda Kab. Luwu Timur di Malili;
- Yang bersangkutan di Tempat;

Lampiran 1

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

N⊄nor Tanggal : 02 Tahun 2012 : 3 Januari 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	KEGIATAN	
1	2	3	4	
1.	MARLINA, SE	Sekretaris	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Nip. 19730310 200312 2 005		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
• 1			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2.	CHAERUDDIN ARFAH.M, S.IP	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
	Nip. 19790206 201001 1 009	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	
3.	HERAWATI RIJAL, SE Nip. 19851115 201001 2 027	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah	1. Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah	
4.	ANDI MUH. REZA ASHAR! WAHYUDDIN, S.STP Nip. 19851006 200412 1 003	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	

PIL KEPALA BADAN,

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

Pangkat : PembinaTk.1 Nip. 19700814 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981 Telepon: (0474) 321495 Fax: (0474) 321495 Email: disdukcapil.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR: /o/ / TAHUN/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 041 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang:

- bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan a. anggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Luwu Timur dan dengan adanya mutasi pejabat struktural lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu mengubah keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Nomor: 041 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- ω Indonesia Nomor 4400); **Undang-Undang** Nomor Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tambahan Nomor Lembaran Tahun Negara 2004 Republik tentang
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Indonesia Nomor 5459); 2014Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Ġ **Undang-Undang** Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Pemerintahan **Undang-Undang** Undang Nomor 9 Tahun Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); diubah beberapa kali terakhir dengan Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Daerah Daerah Nomor Nomor 2015 tentang Perubahan Atas (Lembaran (Lembaran 23 23 Tahun Tahun2014 Negara Negara 2014 Republik Republik Undangtentang tentang
- 6 Pengelolaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Keuangan Daerah Tahun 2005 (Lembaran tentang
- .7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Nomor Pedoman 13 Dalam Negeri Nomir 21 Tahun Tahun 2006 Pengelolan (Berita Negara Keuangan tentang Republik Pedoman
- ∞ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran pembangunan dan Keuangan Daerah Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan
- 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1); Kewenangan Kabupaten Luwu Timur, (Lembaran Daerah
- 10. Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Peraturan Kabupaten Luwu Timur Luwu Daerah Timur Kabupaten Daerah Nomor Kabupaten Luwu Timur Luwu 23) (Lembaran sebagaimana Timur (Lembaran Daerah Kabupaten telah diubah Nomor Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Daerah Timur Perubahan Kabupaten beberapa Timur Nomor 89); Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor kali Luwu Atas terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Timur Nomor 12 Tahun2014 tentang Tahun dengan 2009 Kabupaten tentang Peraturan Luwu Pokok-Pokok Daerah Timur

- 11. Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Peraturan diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah Perangkat Daerah Tahun Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Kabupaten 2016 Daerah Kabupaten Timur Nomor 8 tentang (Lembaran Luwu Tmur Tahun 2020 Nomor 5, Pembentukan Daerah Luwu Tahun 2016 Kabupaten Timur Peraturan Nomor Susunan tentang Nomor nwn
- 12. Peraturan Nomor 13); (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Daerah Kabupaten Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Luwu Timur Luwu Timur Tahun Anggaran Nomor 2022
- 13. Peraturan Bupati Luwu Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tentang Perubahan Nomor 40 Tahun Kedudukan Tugas dan Fungsi serta 2016 atas Timur Nomor 38 Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Susunan Tata Kerja Tahun Organisasi, Luwu Dinas 2018
- 14. tentang Peraturan Bupati Luwu Timur 2021 Nomor 80). (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Timur Nomor 80 Tahun Anggaran 2022 Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPUTUSAN ANGGARAN 2022 PENCATATAN PENCATATAN SIPIL KEPALA SIPIL KABUPATEN TENTANG DINAS KEPENDUDUKAN PERUBAHAN UWU TIMUR PEJABAT TAHUN

KESATU Tahun 2022 telah diubah (daftar terlampir); Beberapa Lampiran dalam Keputusan Kepala Dinas No 041

KEDUA . . terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini; Pejabat Pelaksana Pencatatan tercantum dalam Sipil Teknis Kegiatan Dinas Kependudukan dan lampiran Kabupaten yang Luwu merupakan Timur bagian sebagaimana tidak

KETIGA dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud

a mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

ဂ menyiapkan pelaksanaan kegiatan. dokumen anggaran atas beban pengeluaran

KEEMPAT

. .

KELIMA • • Segala biaya yang dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan Anggaran 2022; Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten Luwu Timur Tahun pelaksanaan kekeliruan ketentuan dalam keputusan ini akan dilakukan Keputusan Apabila ini sebagai akibat penetapan dibebankan dikemudian pada hari perbaikan Anggaran terdapat

sebagaimana mestinya.

pada tanggal 11 April 2022 Ditetapkan di Malili

KEPALA DINAS

<u>Oksen Bija,</u> SH

NIP. 19651025 199510 1001 Pangkat : Pembina Utama Muda

PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR %/ TAHUN 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

2	1	No
Mulyani, S.IP Nip. 19751209 200003 2 002	Hj. Nairawaty, SE Nip. 19720114 200112 1 005	Nama/Nip
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tujangan ASN Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kegiatan /Sub Kegiatan
PPTK	FFIA	Jabatan

Sub Kegiatan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas jabatan Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah Sub Kegiatan pemeliharaan penalatan dan mesin lainnya Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik Kantor kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Sub Kegiatan penyediaan penggandaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan Tamu kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Sub kegiatan Pengadaan Mebel Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang Urusan Pemgadaan Bengadaan Bengadaan Bengadaan Bengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Barang milik daerah penunjang Urusan peralatan dan mesin lainnya Kegiatan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan pemerintah daerah Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah henyemerintah daerah penunjang urusan pemerintah daerah penunjang urusan pemerintah daerah

4			ω	
Elsya, S.Pt Nip. 19760331 200502 2003			Lili Darmawati, SP Nip. 19800507 201101 2003	
Sulter Su	Kinerja Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan keuangan, bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD- kegiatan perencanaan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD- kegiatan perganggaran dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun kegiatan perencanaan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja kinerja kinerja kinerja kinerja kinerja kinerja kinerja kinerja	Sub Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan koordinasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
PPTK			F F 1 F 1	DDW

6	Q	
Sukmawati Syam, S.Kom Nip. 19810216 200902 1002	Rosmala Dewi Amir, SE Nip. 197402042010012004	
Sub kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pengolaan informasi administrasi kependudukan kegiatan penyelenggaraan data pengolaan informasi administrasi kependudukan Sub kegiatan penyediaan Sub kegiatan penyediaan data kependudukan kabupaten/kota kegiatan penyusunan profil kependudukan	Sub kegiatan Pencatatan Penata usahaan dan penerbitan dokumen atas peristiwa penting kegiatan pelayanan pencatatan Spil Sub Kegiatan Pencatatan Sipil Kegiatan pelayanan Pelayanan pencatatan Sipil Kegiatan pelayanan pencatatan sipil Sub Kegiatan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil kegitan penyelenggaraan penyelenggaraan pencatatan Sipil	kependudukan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk
PPTK	PPTK	

KEPALA DINAS,

Oksen Bija, SH

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19651025 199510 1001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks : (0474) 321410 Email : pu@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampudan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- 11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU

Menunjuk/mengangkat (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

PPTK sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja,yaitu:

- Melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, dan
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran
- 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi :
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. Menyimpan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 25 Januari 2022

Kepala Dinas

SYAHMUDDIN, ST., MT. Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19760923 200312 1 005

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Luwu Timur di Malili;
- 2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
- 3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
- 4. Masing masing yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selaku Pengguna Anggaran

Nomor

: 3 Tahun 2022

Tanggal

: 25 Januari 2022

Tentang

Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PERENCANAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. **LUWU TIMUR**

NO.	NAMA PPTK	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	PAKET PERENCANAAN	KET.
BIDA	NG CIPTA KARYA				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	Nama PPTK: Muhamad Yusran Toselong, ST Nip: 19820222201503 1 001 Pangkat/gol: Ahli Muda/III,b Jabatan: Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan			Jasa Konsultansi PerencanaanPembangunan Saluran Drainase Desa Mantadulu		Kec. Angkona
	Lingkungan			Pembangunan saluran drainase Lorong 6 Desa Kalaena Kiri		Kec. Kalaena
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Kasintuwu	Paket 1 CK	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		yang Terhubung Langsung dengan		Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Desa Maleku		Kec. Mangkutana
		Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jasa Konsuftansi Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Desa Maleku Kec. Mangkutana		
				Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Desa Ujung Baru		Kec. Tornoni
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perencanaan PENYEDIAAN SR TERSEBAR DI KAB. LUWU TIMUR		Tersebar di Kab. Luwu Timur
				Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tersebar di Kab.	Paket 9	Tersebar di Kab, Luwu
				Luwu Timur	Paket 10	Timur
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sitem Pengelolaan Setempat	PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA KALAENA KIRI		Kec. Kalaena
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA KANAWATU		
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA PEPURO BARAT		Kec. Wotu
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA MARAMBA		
	Nama PPTK : Halijah, ST			Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Bawalipu Kec. Wotu		
	Nip : 19781109 2009022 006			Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat Kec. Wotu		
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d	Pengelolaan dan Pengembangan		Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau		
2	Jabatan : Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Jasa Konsultansi PerencanaanPembangunan Saluran Drainase Dusun Lestari Desa Laro	Paket 2	Kec. Wotu
		Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jasa Konsultansi Perencanaan PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN PULEMBANG DESA MARAMBA		
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA MADANI		
				Jasa Konsultansi Perencanaan PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA LERA		

NO.	NAMA PPTK	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	PAKET PERENCANAAN	КЕТ.
	Nama PPTK : Halijah, ST			Jasa Konsultansi Perencanaan PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA BENTENG		
	Nip : 19781109 2009022 006			Jasa Konsultansi Perencanaan PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA LUMBEWE	Paket 2	Kec.Burau
	Pangkat/gol: Ahli Muda/III,d			Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Kalatiri		
	Jabatan : Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan			Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Desa Burau		
		Pengelolaan dan	3	Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Drainase Jl. Kroya Desa Lestari Kecamatan Tomoni		
		Pengembangan Sistem Drainase	Dahahilitasi	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Lestari		Ke. Tomoni
		yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Dusun Sidorejo Desa Bangun Jaya		
		Kabupaten/Kota		Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Lr. 9 Timur Desa Kertoraharjo	Paket 3	kec.tomoni timur Kec.Kalaena
				Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Poros Desa Alam Buana		
				Jasa Konsultansi Perencanaan PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA SUMBER MAKMUR		
				Jasa Konsultansi Perencanaan PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA MEKAR SARI		
				Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Drainase		Tersebar di Kab. Luwu Timur
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penataan Bangunan din Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Perencanaan Pemeliharaan SPAM	Paket 6	
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli		Kec. Towuti
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan		Tersebar di Kab. Luwu Timur
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Lingkungan		
			Pemeliharaan dan Perawatan BangunanGedung daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung	Paket 6	Tersebar di Kab. Luwu Timur

NO.	NAMA PPTK	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	PAKET PERENCANAAN	КЕТ.
	Nama PPTK : Halijah, ST	Pembangunan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Perencanaan Pembangunan Palang Pengarnan TPA Tomoni		Kec. Tomoni
	Nip : 19781109 2009022 006 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar kantor Dinas PU-PR Kab. Luwu Timur	Paket 8	Kec. Malili
	Jabatan : Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	di vviiayan Daeran	Bantuan Teknis Pembangunan	Perencanaan Penataan Interior Kantor Dinas PU-PR		
		Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Negara DaerahKabupaten/ Kota			Kec.wasuponda
3	Nama PPTK : Agustinus Allu, ST			Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkar Dusun Laoli Desa Harapan		
	Nip : 19820818 201101 1 011	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lorong Baru Desa Manurung		Kec.Malili
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d	yang Terhubung Langsung dengan	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Dusun Tirtokencono Desa Lakawali	Paket: ⁴	
	Jabatan : Fungsional Teknik tata bangunan dan perumahan	Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	J	Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti		
				Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Dusun Ballawai		Kec. Towuti
				Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Gagak Baru Desa Langkea Raya		
				Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Dusun Loreha Desa Perumpanai Kec. Wasuponda		Kec.Wasupond a
	:	· ************************************		Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Kelurahan Magani		Kec. Nuha
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman dikawasan strategisdaerah kabupaten	pembangunan danpengembanga n infrastruktur kawasan strategis daerah kabupaten kota	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan PJU		
				Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tersebar di Kab. Luwu Timur	Paket 11 CK	Tersebar di Kab. Luwu Timur
		· ·		PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA KERTORAHARJO		Kec.Tomoni
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA PATTENGKO		Timur
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA KORONCIA		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	nyediaan Sub	PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA MALEKU		kec.Mangkutan a
		Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Setempat	PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA WONOREJO TIMUR		
	į			PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA RANTE MARIO		Kec. Tomoni
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA SOLO		Kec. Angkona
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK MEKAR SARI PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK		Kec.Kalaena

NO.	NAMA PPTK	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	PAKET PERENCANAAN	KET.
BIDA	NG BINA MARGA					
	Nama PPTK : Sulan, ST			Peningkatan Jalan Dusun Balo-Balo Desa Balo-Balo		
	Nip : 19810109 200604 1 009	Penyelenggaraan	Pembangunan	Peningkatan Jalan Dusun Wulasi Desa Manurung		Kec.
4	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d	Jalan Kabupaten/Kota		Pengerasan Jalan Sambee Dusun Labose Desa Laskap		Wasuponda
	Jabatan : Fungsional Teknik jalan dan Jembatan			Pembentukan Jalan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai		
BIDA	NG SUMBER DAYA AIR				·	
	Nama PPTK : BUDI UTOMO, ST					
	Nip : 198205202008031001	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan	n			
5	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d	Sekunder pada Daerah Irigasi yang	Peningkatan Jaringan Irigasi	E-PAKSi (DAK-Penugasan)		
	Jabatan : Fungsional Teknik Pengairan	Loasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah	vah Permukaan n 1 h			
	Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kabupaten/Kota				

Malili, 25 Januari 2022 Kepala Dinas

SYAHMUDDIN, ST.,MT Pangkat : Pembina

Nip : 19760923 200312 1 005

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selaku Pengguna Anggaran

Nomor : 3 Tahun 2022 Tanggal : 25 Januari 2022

Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) FISIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB.

NO.	JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	KET.
IDA	NG CIPTA KARYA				
ĺ	Nama PPTK : Halijah, ST			Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau	Kec. Wotu
	Nip : 19781109 2009022 006			Pembangunan Drainase Desa Kalatiri	
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d Jabatan : Fungsional Teknik Penyehatan			PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA BENTENG	
	Lingkungan			Pembangunan Saluran Drainase Desa Burau	Kec.Burau
				PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA LUMBEWE	
				PEMB. SALURAN DRAINASE DESA MEKAR SARI	
				PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA SUMBER MAKMUR	Kec.Kalaena
				Lanjutan Pembangunan Drainase Jl. Kroya Desa Lestari Kecamatan Tomoni	
				Pembangunan Drainase Desa Lestari	Kec. Tomoni
				Pembangunan Saluran Drainase Dusun Sidorejo Desa Bangun Jaya	
				Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Lr. 9 Timur Desa Kertoraharjo	Kec.tomoni tim
		 		Pembangunan Saluran Drainase Poros Desa Alam Buana	
				Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Bawalipu Kec. Wotu	
				Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat Kec. Wotu	
				Pembangunan Saluran Drainase Dusun Lestari Desa Laro	
				PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA LERA	Kec. Wotu
				PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN PULEMBANG DESA MARAMBA	
				Pemeliharaan Drainase Dusun Salluborro Desa Bawalipu	
			Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli	Kec. Towuti
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM Jaringan perpiaan di	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ledu-Ledu	Kec. Wasupond
		Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	kawasan perdesaan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tampinna	Kec. Angkona
			Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	Pemeliharaan SPAM	

of Spatistic and the second

NO.	JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	KET.
	Nama PPTK : Halijah, ST	Pengembangan sistem dan pengelolaanPersampahan di daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Pembangunan Palang Pengaman TPA Tomoni	Kec. Tomoni
	Nip : 19781109 2009022 006	Penyelenggaraan penataan bangunan dan Lingkungannya	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pemeliharaan Bangunan Lingkungan	
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d	di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan bangunan dan lingkungan	Lanjutan pembangunan pagar kantor Dinas PU-PR Kab. Luwu Timur	Kec. Malili
	Jabatan ; Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan		Pemeliharaan dan perawatan bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Bangunan Gedung	Tersebar di Kab. Luwu Timur
		Penyellenggaraan banguan gedung diwilayah daerah Kabupaten/Kota		LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA WASUPONDA	Kec. Wasuponda
		pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat	Pembangunan	Penataan Interior Kantor Dinas PU- PR	Kec.malili
		Sertilikat	Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	PEMBANGUNAN KANTOR KORAMIL MANGKUTANA	Kec. Mangkutana
				PEMBANGUNAN KANTOR KORAMIL NUHA	Kec. Nuha
		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik	Tersebar di Kab. Luwu Timur
	Nama PPTK : Muhamad Yusran Toselong, ST Nip : 19820222201503 1 001 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,b		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Desa Mantadulu	Kec. Angkona
	Jabatan : Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	_		Pembangunan Saluran Drainase Lorong 6 Desa Kalaena Kiri	Kec. Kalaena
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Drainase Desa Kasintuwu	
				Pembangunan Saluran Drainase Desa Maleku	Kec. Mangkutana
				Pembangunan Saluran Drainase Desa Maleku Kec. Mangkutana	
2				Pembangunan Saluran Drainase Desa Ujung Baru	Kec.Tomoni
-		Pengelolaan dan	_	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Maramba	Kec. Wotu
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	di Kawasan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Purwosari	Kec. Tomoni Timur
		Kabupaten/Kota	Perdesaan	PENYEDIAAN SR TERSEBAR DI KAB. LUWU TIMUR	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER	Kec. Malili

NO.	JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	KET.
	Nama PPTK : Muhamad Yusran Toselong, ST			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tersebar Di Kab Luwu Timur	
	Nip : 19820222201503 1 001			MANUNGGAL	Kec. Tomoni Timur
	Pangkat/gol:Ahli Muda/III,b			SUMBER AGUNG	
	Jabatan : Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan			ARGOMULYO	Kec. Kalaena
				MULYASRI	Kan Tamani
				BANGUN KARYA	Kec. Tomoni
				MATANO	Kec. Nuha
				CENDANA	Kec. Burau
				BATU PUTIH	
				CENDANA HIJAU	
	Pengelolaan dan Pengenbangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pembagunan/Penye	LERA	Kec. Wotu
		Limbah Domestik dalam	diaan Sub Sistem Pengelolaan	BALO-BALO	
		Daerah Kabupaten/Kota	Setempat	RINJANI	
			PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA KALAENA KIRI	Kec. Kalaena	
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA KANAWATU	
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA MADANI	Kec. Wotu
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA MARAMBA	Neo. Wold
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA PEPURO BARAT	
	Nama PPTK: Agustinus Allu, ST Nip: 19820818 201101 1 011 Pangkat/gol: Ahli Muda/III,d			Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkar Dusun Laoli Desa Harapan	
	Jabatan : Fungsional Teknik tata bangunan dan perumahan			Pembangunan Saluran Drainase Lorong Baru Desa Manurung	Kec. Malili
				Pembangunan Drainase Dusun Tirtokencono Desa Lakawali	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Pembangunan	Lanjutan Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	
		Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Ballawai	Kec. Towuti
	·	Kabupaten/Kota		Pembangunan Saluran Drainase Jalan Gagak Baru Desa Langkea Raya	
·				Pembangunan Drainase Dusun Loreha Desa Perumpanai Kec. Wasuponda	Kec. Wasuponda
				Pembangunan Drainase Kelurahan Magani	Kec. Nuha

NO.	JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	KET.
	Nama PPTK : Agustinus Allu, ST	Penyelenggaraan	Pembangunan dan Pengembangan	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	
	Nip : 19820818 201101 1 011	Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis	Infrastruktur Kawasan Permukiman di	Pembangunan PJU Desa Mahalona	Kec.Towuti
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d	DaerahKabupaten/Kota	Kawasan Strategis Daeraha Kabupaten/Kota	Pembangunan PJU Dusun Balambano Indah Desa Puncak Indah	Kec. Malili
	Jabatan : Fungsional Teknik tata bangunan dan perumahan	Penyelenggaran	Bantuan Teknis Pembangunan	Pembangunan Mess Pemda Kab. Luwu Timur di Jakarta	Jakarta
		Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan	Kabupaten/Kota	LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR	Malili
	Banguan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedng	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung		
				Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tersebar Di Kab Luwu Timur	
				PUNCAK INDAH	
			ussu	Kec. Malili	
				WEWANGRIU	
				LIBUKAN MANDIRI	
			MAHALONA	Kec.Towuti	
				BUANGIN	
			PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA KERTORAHARJO		
		Pengelolaan dan		PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA PATTENGKO	Kec.tomoni timur
		Pengelolaan dan Pengenbangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA RANTE MARIO	Kec. Tomoni
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA KORONCIA	
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA MALEKU	Kec. Mangkutana
			PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA WONOREJO TIMUR		
			PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK DESA SOLO	Kec. Angkona	
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK MEKAR SARI	
				PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PEDESAAN MINIMAL 50 KK SUMBER MAKMUR	Kec. Kalaena

NO.	JABATAN	KEGIATA	N SUB-		T		
BIDA	NG BINA MARGA		SUB KE	GIATAN	PEKERJAAN		KET.
	Nama PPTK : Abdul daffar, ST						
	Nip : 19770901 201001 1 014						
J.	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,c Jabatan : Fungsional Teknik jalan dan Jembatan				Peningkatan Jalan Refo Desa Maliwowo (Ruas Ma		Angkon
- 1					2)		,
- 1					Lanjutan Peningkatan Jalar		
			1		Poros Ruas Cendana (Cer	ndana	
- 1			1	- 4	<u>'/</u>	j	
				li	Lanjutan Pengerasan Jalan Lambara	Desa	
			1	r			
			1		^D eningkatan Jalan Desa Lag	1	
				/F	Pembangunan jalan proteksi	i	
				ľ	alan lorong 1 dan 2 desa Bo Pute	one Kec.	Burau
				P B	engerasan jalan durian dusi ambalu desa Lumbewe	un	
				Pe De	engkerikilan Jalan masjid ra esa Burau	- 1	
					embangunan Jalan Poros Do ne Pute	1	
			Pembangunan	Jalan	ningkatan jalan lorong 5 dus anasari desa Cendana hitan	Timu	moni r
					ngerasan Jalan Dusun Lang sa Lampenai	1	
		Penyelenggaraan Jala Kabupaten/Kota	an	Jaia	nbentukan Dan Pengerasar n Desa tadulakoan Pepuro	1	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Tab	jutan peningkatan jalan Des aroge (Ruas tabaroge 2)	1	
				lanju Desa	rtan Peningkatan Jalan Lopp a Lampenai	1	
				Penir Balo	ngkatan Jalan Dusun Balo- Desa Balo-Balo	Kec. Wo	tu
				Peng	erasan jalan desa tabaroge		
				Penga marar	erasan jalan, Jl.Karya nnu Desa tarengge timur	1	
				Penge	erasan Jalan Pojatobu desa gge timur	1	
					rasan jalan wonorejo Timur	Kec. Mangkut	ana
				Pening Termin	katan Jalan Akses al/Pusat Niaga		\dashv
				Tabose	n Peningkatan jalan dusun desa Laskap	Kec. Malili	
		,	Pembangunan Jembatan	- CKUDU	ngunan Jembatan Akses ran Desa Mabonta	Kec. Burau	1
			modiaji	Pembar Poros L	ngunan Jembatan Jalan oppe Dusun Benteng		7
				Pelebara	an Jembatan Jalan	Kec. Wotu	
		1	Pelebaran Jembatan	Pelebara Kalatiri	n Jembatan Jalan Desa		

NO	JABATAN	KEGIATAN	SIID VEGILE		
	Nama PPTK : Tintin Sumarni, ST		SUB KEGIATAI	PEKERJAAN	KET.
	Jabatan : Fungsional Teknik jalan dan Jembatan			Peningkatan Jalan Menuju Pemakaman Desa Kertoraharj	Kec.Tomoni Tin
	Johnbalan			Lanjutan Peningkatan Jalan De Mantadulu	sa Kec. Angkona
	230004 2 004			Pembangunan Jembatan Desa Pertasi Kencana	1
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,b Jabatan : Fungsional Teknik jalan dan			Peningkatan Jalan desa Sindu Agung	Kec. Kalaena
	Jembatan			Lanjutan peningkatan Jalan Rua Bahari 1 Desa Bahari	s Kec.Wotu
			Pembangunan Jalar	Lanjutan Peningkatan Jalan Rus	1
			angunan darai	Peningkatan Jalan desa Parumpanai	Kec. Wasuponda
5				Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tampina	Trasuponias
				Pembangunan Proteksi Jalan Dusun Sidodadi Desa Solo	
				Pembentukan Jalan Dusun Watampanua Desa Lamaeto	
				Pengerasan Jalan Dusun Gentabuana Desa Taripa	Kec. Angkona
				Pengerasan Jalan Dusun Martasari dan Martaguna Desa	
			1 1	mantadulu	
			Pembangunan Jalan	Peningkatan Jalan Lr.12 Desa Sumber Makmur	
			ļ ļi	Peningkatan Jalan Dan Pemukiman Desa Sumber Agung	Kec. Kalaena
			Pembangunan F Jembatan T	Pembangunan Jembatan Desa aripa	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	P	embangunan Jalan Beton Desa arabbi	
			ען	anjutan Pengerasan Jalan usun Lembah ke Dusun engkositara Desa Tarabbi	
			W	njutan Pembangunan Proteksi Ian Lorong Lerengkume Dusun ulasi	
			(Du	njutan Peningkatan Jalan sun Susuejaya dan Dusun tokoncono Desa Lakawali	
			Lak	ngerasan Jalan Lorong 3 dan Jusun Podomoro Desa Kawali	
			Per Per	ningkatan Jalan Dalam mukiman Desa Manurung	
			j Gar	nbentukan Jalan Samping du Induk KM 4 Dusun Imbano Desa Puncak Indah	Kec. Malili
			Peni Desa	ngkatan Jalan Dusun Wulasi a Manurung	
			Desa	bentukan Jalan Lingkungan a Puncak Indah	
			Peng Indah	erasan Jalan Desa Puncak (Depan Texture)	
			Pemb Popo Laska	pentukan Jalan Sungai ng Dusun Karebbe Desa ap	
			Dusur	erasan Jalan Sambee n Labose Desa Laskap	
			Penin Permu	gkatan Jalan dalam Ikiman jalan Ambo Ngan	
			Lanjut	an Peningkatan Jalan	
		1	Kulube Laskar	dusun Labose Desa	

NO.	JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	KET.	
	Nama PPTK : Tintin Sumarni, ST Nip : 19771108 200604 2 004 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,b		Pembangunan Jalan	Peningkatan Jalan Dalam Permukian Desa Masiku Pengerasan Jalan Jalur Dua Desa Kalosi Pengerasan Jalan Trans Sulawesi Desa Mahalona Pengerasan Jalan Desa Matano	Kec. Towuti	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Peningkatan Jalan Kelurahan Magani Pengerasan Jalan Dusun Bonepute Desa Nuha	Kec. Nuha	
				Pembangunan Jembatan Desa Manurung Desa Lakawali		
			Pembangunan	Pembangunan Jembatan Sungai Popong Dusun Karebbe Desa Laskap	Kec. Malili	
		Jembatan	Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Pasi-Pasi Dan Desa Harapan			
				Pembangunan Jembatan Desa Taripa	Kec. Angkona	
6	Nama PPTK : Sulan, ST Nip : 19810109 200604 1 009 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d			Peningkatan Jalan RUAS Tole- Tole - Landangi Pembangunan Jalan Dalam Permukiman Dusun Cinta Damai Desa Balambano Pembangunan Jalan Proteksi Jalan Dongi-Dongi Desa Ledu- Ledu		
	Jabatan : Fungsional Teknik jalan dan Jembatan			Pembentukan Jalan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai	Kec. Wasuponda	
						Pengerasan Jalan Dusun Lampangi Barat, Rende-Rende, Desa Parumpanai
:				Pengerasan Jalan Lampangi Timur ke Lampangi Barat Desa Parumpanai		
				Peningkatan Jalan Akses SMP 3 Dusun Togo		
			Pembangunan Jalan	Peningkatan Jalan Dusun Togo Pengerasan Jalan S. Begawan		
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	Solo Desa Langkea Raya Peningkatan Jalan Komodo Desa Langkea Raya		
				Pengerasan Jalan Dalam Permukiman Desa Loeha		
				Lanjutan peningkatan jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole)		
				Pembangunan Jalan Dalam Permukiman Dusun Malindoe Desa Lioka		
				Lanjutan Pengerasan Jalan Desa Buangin	Kec. Towuti	
				Pembangunan Jalan Dalam Permukiman JL.Pontara Dusun Wawomeusa Desa Wawondula		
				Pengerasan Jalan Desa Timampu Pengerasan Jalan Labu 1 Desa		
			Pembangunan Jembatan	Wawondula Pembangunan Jembatan Jalan Veteran Ujung Desa Langkea Raya		

NO.	JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	KET.
	Nama PPTK : Tintin Sumarni, ST Nip : 19771108 200604 2 004 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,b		Pembangunan Jalan	Peningkatan Jalan Dalam Permukian Desa Masiku Pengerasan Jalan Jalur Dua Desa Kalosi Pengerasan Jalan Trans Sulawesi Desa Mahalona	Kec. Towuti
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Pengerasan Jalan Desa Matano Peningkatan Jalan Kelurahan Magani Pengerasan Jalan Dusun Bonepute Desa Nuha	Kec. Nuha
				Pembangunan Jembatan Desa Manurung Desa Lakawali Pembangunan Jembatan Sungai	
			Pembangunan Jembatan	Popong Dusun Karebbe Desa Laskap Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Pasi-Pasi Dan	Kec. Malili
				Desa Harapan Pembangunan Jembatan Desa Taripa	Kec. Angkona
6	Nama PPTK : Sulan, ST Nip : 19810109 200604 1 009			Peningkatan Jalan RUAS Tole- Tole - Landangi Pembangunan Jalan Dalam Permukiman Dusun Cinta Damai Desa Balambano	
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d Jabatan : Fungsional Teknik jalan dan			Pembangunan Jalan Proteksi Jalan Dongi-Dongi Desa Ledu- Ledu Pembentukan Jalan Dusun	
	Jembatan			Lahumpangi Timur Desa Parumpanai Pengerasan Jalan Dusun Lampangi Barat, Rende-Rende, Desa Parumpanai	Kec. Wasuponda
				Pengerasan Jalan Lampangi Timur ke Lampangi Barat Desa Parumpanai	
				Peningkatan Jalan Akses SMP 3 Dusun Togo Peningkatan Jalan Dusun Togo	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Pengerasan Jalan S. Begawan Solo Desa Langkea Raya Peningkatan Jalan Komodo Desa Langkea Raya Pengerasan Jalan Dalam Permukiman Desa Loeha	
				Lanjutan peningkatan jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole)	
				Pembangunan Jalan Dalam Permukiman Dusun Malindoe Desa Lioka	Kec. Towuti
				Lanjutan Pengerasan Jalan Desa Buangin Pembangunan Jalan Dalam	Nec. Towali
				Permukiman JL Pontara Dusun Wawomeusa Desa Wawondula Pengerasan Jalan Desa Timampu	
			Pembangunan Jembatan	Pengerasan Jalan Labu 1 Desa Wawondula Pembangunan Jembatan Jalan Veteran Ujung Desa Langkea Raya	

NO.	JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	KET.			
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi	Peningkatan Jaringan irigasi D.I Tawakua (DAK Penugasan)	Kec. Angkona			
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan Pintu Kleep Dusun Apala Desa Balo - Balo	Kec. Wotu			
	Nama PPTK : ISHWAN APRIANTO, ST			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bantilang				
	Vip : 19840418 200902 1 003 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Rante Angin					
	Pangkat/gol : Penata TK.1/III,b	Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Dusun Tirowali Desa Timampu	Kec. Towuti			
	Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha		, ,	` '	` '		Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Libukan Mandiri	
				Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Mahalona				
				Pembangunan Bronjong Desa Pekaloa	Kec, Towuti			
10		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	Damhanaunan	Pembangunan Bronjong Dusun Wawomeusa Desa Wawondula	rec, rowdii			
		Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bronjong RT 01 Dan RT 02 Dusun Balambano, Desa Balambano				
				Pembangunan Talud Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai	Kec. Wasuponda			
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Pembangunan Pintu	Pembangunan Pintu Air Desa Rante Angin	Kec, Towuti			
		Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan Pintu Air Dusun Lampangi Barat Rende-Rende Desa Parumpanai	Kec. Wasuponda			

Malili, 25 Januari 2022

Keyala Dinas

SYAHMUDDIN, ST., MT.

Pangkat : Pembina Nip : 19760923 200312 1 005 Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selaku Pengguna Anggaran

Nomor : 3 Tahun 2022

Tangga! : 25 Januari 2022

Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 Tentang

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PENGAWASAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. **LUWU TIMUR**

NO.	NAMA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	PAKET PENGAWASAN	KET.			
	NG CIPTA KARYA				·1-	l			
1	Nama PPTK : Muhamad Yusran Toselong, ST			Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Desa Mantadulu		Kec. Angkona			
	Nip : 19820222201503 1 001	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan saluran drainase Lorong 6 Desa Kalaena Kiri		Kec.Kalaena			
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,b		Sistem Drainase	Sistem Drainase	Sistem Drainase	Vang Terbubung Pembanguna	Pembangunan Drainase Desa Kasinti	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Drainase Desa Kasintuwu	
	Jabatan : Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Sistem Drainase Lingkungan	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Desa Maleku	Paket 1	Kec. Mangkutan			
		Kabupaten/Kota		Jasa Konsuftansi Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Desa Maleku Kec. Mangkutana					
				Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Desa Ujung Baru		Kec. Tomoni			
		Pengelolaan dan Pengembangan	I Chadsan Of Air	Jasa Konsultansi Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Maramba	Paket 6	Kec. Wotu			
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jasa Konsultansi Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Purwosari	Paket 7	Kec. Tomoni Timur			
		Kabupaten/Kota		Pengawasan PENYEDIAAN SR TERSEBAR DI KAB, LUWU TIMUR		Tersebar di Kab. Luwu Timur			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan	/pellyeulaali	Pengawasanpebangunan tangki septik	Paket 11	Tersebar di Kab			
		Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	sub.sistempengol ahan setempat	skala individual perdesaan tersebar dikabupaten luwu timur	Paket 12	Luwu Timur			
2	Nama PPTK : Halijah, ST			Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau		Kec. Wotu			
	Nip : 19781109 2009022 006			Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Drainase Desa Kalatiri					
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d			Jasa Konsultansi Pengawasan PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA BENTENG	Paket 2				
	Jabatan : Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	;		Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Desa Burau		Kec. Burau			
				Jasa Konsultansi Pengawasan PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA LUMBEWE					
				Jasa Konsultansi Perencanaan PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA SUMBER MAKMUR		Kec. Kalaena			
				Jasa Konsultansi Perencanaan PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA MEKAR SARI		Nec. Naideria			
				Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Drainase Jl. Kroya Desa Lestari Kecamatan Tomoni					
			<u> </u>	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Lestari	Paket 3	Kec. Tomoni			
			ļ. -	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Dusun Sidorejo Desa Bangun Jaya					
				Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Lr. 9 Timur Desa Kertoraharjo		Kec. Tomoni			
				Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Poros Desa Alam Buana		Timur			

			Pengawasan LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA WASUPONDA		Kec.Wasuponda
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar kantor Dinas PU-PR Kab. Luwu Timur	Paket 8	
	Pembangunan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Pengawasan Pembangunan Palang Pengaman TPA Tomoni		Kec.Tomoni
	dan lingkungan di daerah kabupaten/ kota	bangunan dan lingkungan	Pengawasan pemeliharaan Bangunan Gedung		
	Penyelenggaraan penataan bangunan	Pemeliharaan	Pengawasan pemeliharaan Lingkungan	Paket 14	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan pemeliharaan SPAM dikawasanperdes aan	Pengawasan pemeliharaan SPAM	Dollar 44	
	Kabupaten/Kota	,	Pengawasan pembangunan jaringan perpiaan Desa Tampinna		Kec. Angkona
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	SPAM Jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Pengawasan pembangunan jaringan perpiaan Desa Ledu-Ledu		Kec. Wasuponda
	Pengelolaan dan Pengembangan	Peningkatan	Jasa Konsultasi pengawasan peningkatan SPAM jaringan perpipaan Desa Asuli	Paket 5	Kec. Towuti
	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah kabupaten/ kota	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Pengawasan pemeliharaan Lingkungan	Paket 14	
		Rehabilitasi saluran drainase lingkungan	Jasa konsultansi pengawasan pemeliharaan saluran drainase		Tersebar Kab. Luwu Timur
			Pemeliharaan Drainase Dusun Saluborro Desa Bawalipu		
			Jasa Konsultansi Pengawasan PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN PULEMBANG DESA MARAMBA		
Jabatan : Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan			Jasa Konsultansi Pengawasan PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA LERA		Kec. Wotu
Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d			Jasa Konsultansi Pengawasan PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE Dusun Lestari DESA Laro	Paket 2	
Nip : 19781109 2009022 006			Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat Kec. Wotu		
Nama PPTK : Halijah, ST			Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Bawalipu Kec. Wotu		

Nama PPTK : Halijah, ST	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunar (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan Bangunan Bangunan Gedung Negara	Pengawasan Penataan Interior Kantor Dinas PU-PR										
Nip : 19781109 2009022 006 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah	Bantuan Teknis Pembangunan	Pengawasan pembangunan kantor koramil Mangkutana		Kec. Mangkuta								
Jabatan : Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan		Bangunan Gedung Negara DaerahKabupater /Kota		Paket 10	Kec. Wasupon								
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik		Tersebar di Ka Luwu Timur								
Nama PPTK : Agustinus Allu, ST			Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkar Dusun Laoli Desa Harapan										
Nip : 19820818 201101 1 011			Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Lorong Baru Desa Manurung		Kec.Malili								
Pangkat/gol : Ahlí Muda/III,c	Pengelolaan dan		Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Drainase Dusun Tirtokencono Desa Lakawali										
Jabatan : Fungsional Teknik tata bangunan dan perumahan	Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Pembangunan Sistem Drainase	Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	Paket 4									
	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sungai dalam Daerah	Sungai dalam Daerah	Sungai dalam Daerah	Sungai dalam Daerah	Sungai dalam Daerah	Sungai dalam Daerah	Sungai dalam Daerah	Sungai dalam	Lingkungan	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Dusun Ballawai		Kec. Towuti
			Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Gagak Baru Desa Langkea Raya										
			Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Drainase Dusun Loreha Desa Perumpanai Kec. Wasuponda		Kec. Wasupon								
			Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Drainase Kelurahan Magani		Kec. Nuha								
	Penyelenggaraaninsf rastruktur pada pemukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/ Kota	Pembangunan danpengembanga n infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jasa konsultasi pengawasan pembangunan PJU	Paket 9									
			Pengawasan Pembangunan Islamic Center										
			Pengawasan lanjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur										
		ļ , i	Pengawasan pembangunan Mess Pemda Kabupaten Luwu Timur Di Jakarta		Jakarta								
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air IimbahDomestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan setempat	Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan tersebar di Kab. Luwu Timur	Paket 13									

Nama PPTK : Abdul daffar, ST			Peningkatan Jalan Reformasi Desa	
prama FFIA . Awdul danar, 51			Maliwowo (Ruas Maliwowo 2)	Kec. Angkon
Nip : 19770901 201001 1 014			Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Ruas Cendana (Cendana 1)	
Pangkat/gol : Ahli Muda/III,c			Lanjutan Pengerasan Jalan Desa Lambara	
Jabatan : Fungsional Teknik jalan dan Jembatan			Peningkatan Jalan Desa Lagego	
			Pembangunan jalan proteksi Jalan lorong 1 dan 2 desa Bone Pute	Kec. Burau
			Pengerasan jalan durian dusun Bambalu desa Lumbewe	
	Penyelenggaraan		Pengkerikilan Jalan masjid raya Desa Burau	
	Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Poros Desa Bone Pute	
			Pembentukan Dan Pengerasan jalan Desa tadulakoan Pepuro	Kec. Tomor
			Peningkatan jalan lorong 5 dusun Wanasari desa Cendana hitam	Kec. Tomon Timur
			Lanjutan peningkatan jalan Desa Tabaroge (Ruas tabaroge 2)	
			lanjutan Peningkatan Jalan Loppe Desa Lampenai	
			Peningkatan Jalan Dusun Balo-Balo Desa Balo-Balo	
			Pengerasan Jalan Dusun Langgiri Desa	Kec. Wotu
			Pengerasan jalan desa tabaroge	
			Pengerasan jalan, Jl.Karya marannu Desa tarengge timur	
			Pengerasan Jalan Pojatobu desa Tarengge timur	
			Peningkatan Jalan Akses Terminal/Pusat Niaga	
			Lanjutan Peningkatan jalan dusun labose desa Laskap	Kec. Malili
		Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan wonorejo Timur	Kec. Mangkuta
			Pembangunan Jembatan Akses Pekuburan Desa Mabonta	
			Pembangunan Jembatan Jalan Poros Loppe Dusun Benteng	Kec. Burau
			Pembangunan Jemnabatan Karambua	
			Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1)	Kec. Wotu
		Pelebaran Jembatan	Pelebaran Jembatan Jalan Desa Kalatiri	Kec. Burau
Nama PPTK : Tintin Sumarni, ST			Peningkatan Jalan Menuju Pemakaman Desa Kertoraharjo	Kec. Tomon Timur
Nip : 19771108 200604 2 004			Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Mantadulu	
Pangkat/gol : Ahli Muda/III,b			Lanjutan peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari	Kec. Wotu
Jabatan : Fungsional Teknik jalan dan Jembatan			Peningkatan Jalan desa Sindu Agung	Kec. Mangkuta
			Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru	Kec. Wasupor
			Peningkatan Jalan desa Parumpanai	
		Pembangunan	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tampina	
		Jalan	Pembangunan Proteksi Jalan Dusun Sidodadi Desa Solo	
			Pembentukan Jalan Dusun Watampanua	Kec. Angkon
			Pengerasan Jalan Dusun Gentabuana	
			Desa Taripa Pengerasan Jalan Dusun Martasari dan Martaguna Desa Martadulu	
			Martaguna Desa Mantadulu Peningkatan Jalan Lr.12 Desa Sumber	

			Peningkatan Jalan Dan Pemukiman Desa	!
Nama PPTK : Tintin Sumarni, ST	Penyelenggaraan Jalan		Sumber Agung	
Nip : 19771108 200604 2 004	Kabupaten/Kota		Lanjutan Pengerasan Jalan Dusun Lembah ke Dusun Tengkositara Desa	
101711002000042004			Tarabbi	
Pangkat/gol : Ahli Muda/III,b			Lanjutan Pembangunan Proteksi Jalan Lorong Lerengkume Dusun Wulasi	
Jabatan : Fungsional Teknik jalan dan Jembatan			Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Susuejaya dan Dusun Tirtokoncono Desa Lakawati	
			Pengerasan Jalan Lorong 3 dan 4 Dusun Podomoro Desa Lakawali	
			Peningkatan Jalan Dalam Permukiman Desa Manurung	
			Pembentukan Jalan Samping Gardu Induk KM 4 Dusun Balambano Desa Puncak Indah	
			Peningkatan Jalan Dusun Wulasi Desa Manurung	
			Pembentukan Jalan Lingkungan Desa Puncak Indah	
			Pengerasan Jalan Desa Puncak Indah (Depan Texture)	Kec. Kalaena
			Pembangunan Jembatan Sungai Popong Dusun Karebbe Desa Laskap	
			Pengerasan Jalan Sambee Dusun Labose Desa Laskap	
			Peningkatan Jalan Dalam Permukiman Jalan Ambo Ngaru Desa Laskap	
			Lanjutan Peningkatan Jalan Kulube dusun Labose Desa Laskap	
		-	Peningkatan Jalan Dalam Permukian Desa Masiku	
			Pengerasan Jalan Jalur Dua Desa Kalosi	
			Pengerasan Jalan Trans Sulawesi Desa Mahalona	
			Pengerasan Jalan Desa Matano	
			Peningkatan Jalan Kelurahan Magani	
			Pengerasan Jalan Dusun Bonepute Desa Nuha	
			Pembangunan Jembatan Desa Manurung Desa Lakawali	
			Pembangunan Jembatan Sungai Popong Dusun Karebbe Desa Laskap	
		Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Desa Pertasi Kencana	
		:	Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Pasi-Pasi Dan Desa Harapan	Kec. Nuha
			Pembangunan Jembatan Taripa	
Nama PPTK : Sulan, ST Nip : 19810109 200604 1 009 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d Jabatan : Fungsional Teknik jalan dan Jembatan			Peningkatan Jalan RUAS Tole-Tole - Landangi	
Comparati			Pembangunan Jalan Dalam Permukiman Dusun Cinta Damai Desa Balambano	
			Pembangunan Jalan Proteksi Jalan Dongi- Dongi Desa Ledu-Ledu	
			Pembentukan Jalan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai	Kec. Wasuponda
			Pengerasan Jalan Dusun Lampangi	
			Barat, Rende-Rende, Desa Parumpanai Pengerasan Jalan Lampangi Timur ke Lampangi Barat Desa Parumpanai	
			Peningkatan Jalan Akses SMP 3 Dusun	
			Peningkatan Jalan Dusun Togo	
			Pengerasan Jalan S. Begawan Solo Desa Langkea Raya	
			Peningkatan Jalan Komodo Desa Langkea Raya	
			Pengerasan Jalan Dalam Permukiman	1

	Nama PPTK : Sulan, ST Nip : 19810109 200604 1 009 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d Jabatan : Fungsional Teknik jalan dan Jembatan	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan	Lanjutan peningkatan jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) Pembangunan Jalan Dalam Permukiman Dusun Malindoe Desa Lioka Lanjutan Pengerasan Jalan Desa Buangin Pembangunan Jalan Dalam Permukiman JL.Pontara Dusun Wawomeusa Desa Wawondula Pengerasan Jalan Desa Timampu Pengerasan Jalan Labu 1 Desa Wawondula Pembangunan Jembatan Jalan Veteran Ujung Desa Langkea Raya Lanjutan Peningkatan Jalan poros Sumber Agung - Mekar Sari Pemeliharaan Jalan Aspal		Kec. Towuti	
		Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan	Pemeliharaan Jembatan Tersebar			
	Bidang Sumber Daya Air						
7	Nama PPTK : I KOMANG EDIWIJAYA, ST	Pembangunan Bangunan Perkuatan		Pembangunan Lening Saluran Pembuang dusun Karang Anyar Desa Muliyasri			
	Nip : 19870124 201101 1 006			Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Kalpataru			
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,c		:	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Puncak Indah (DAK Penugasan)		Kec. Tomoni	
]	Jabatan : Fungsional Teknik Pengairan			Lanjutan Pembangunan Tanggul Sungai Malili			
		Tebing		Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Lr. 7 Desa Margomutyo			
				Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Desa Margolembo			
				Pembangunan Bronjong Dusun Korondeme Desa Koroncia		Kec. Mangkutana	
				Pembangunan Proteksi Sungai Magege Dusun Sendang Sari 1 Desa Wonorejo			
		Pengeloaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)	Rehabilitasi Tanggul Sungai				
			Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				
			Normalisasi/Rest orasi Sungai				
			Rehabilitasi Seawal dan Bangunan Pengaman Pantai				
			Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing				
		Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				
			Opersi dan Pemeliharaan Benmdung Irigasi				
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi				

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
6	Nama PPTK : Sulan, ST			Lanjutan Peningkatan Jalan poros Sumber Agung - Mekar Sari	Kec. Kalaena
	Nip : 19810109 200604 1 009	Penyelenggaraan		Peningkatan Jalan Dusun Balo-Balo Desa Balo-Balo	Tersebar di Kab.
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d		Pembangunan Jalan	Pengerasan Jalan Desa Puncak Indah (Depan Texture)	Luwu Timur
	Jabatan : Fungsional Teknik jalan dan Jembatan	Jalan Kabupaten/Kota	Jalan P	Pengerasan Jalan Sambee Dusun Labose Desa Laskap	Kec. Wotu
				Peningkatan Jalan Dusun Wulasi Desa Manurung	
			Rehabilitasi Jalan	Pemeliharaan Jalan Aspal	Kec. Malili
			Rehabilitasi Jembatan	Pemeliharaan Jembatan Tersebar	
Bida	ng Sumber Daya Air		o modali.		
7	Nama PPTK : I KOMANG EDIWIJAYA, ST			Pembangunan Lening Saluran Pembuang dusun Karang Anyar Desa Muliyasri	Kec. Tomoni
	Nip : 19870124 201101 1 006	Darah an anna a	:	Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Lr. 7 Desa Margomulyo	Trock Tollion
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,c	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Desa Margolembo	
	Jabatan : Fungsional Teknik Pengairan			Pembangunan Bronjong Dusun Korondeme Desa Koroncia	Kec. Mangkutana
			!	Pembangunan Proteksi Sungai Magege Dusun Sendang Sari 1 Desa Wonorejo	
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Kalpataru	Kec.Tomoni
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Puncak Indah (DAK Penugasan)	Kec. Malili
		Pembangunan Tanggul Sungai		Lanjutan Pembangunan Tanggul Sungai Malili	Nec. Maili
8	Nama PPTK : BUDI UTOMO, ST				
	Nip : 19820520 200803 1 001			Lanjutan Pembangunan Perkuatan	Kec. Malili
	Pangkat/gol:Ahli Muda/III,d	Pembangunan		Tebing Sungai Malili	Nec. Maiiii
	Jabatan : Fungsional Teknik Pengairan	Bangunan Perkuatan Tebing			
		rebing		Pembangunan Bronjong Sungai La sio - Sio Dusun Puncak Indah	
				Pembangunan Proteksi Sungai Angkona Desa Watang Panua	
		Pembangunan Seawal Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainya		Peningkatan Jaringan irigasi D.I Tawakua (DAK Penugasan)	Kec. Angkona
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Pembangunan Talud Pantai Desa Pasi - Pasí	Kec. Malili
		Pembangunan		Pembangunan Bronjong Dusun Marannu Desa Lambara Harapan	AGO. INGIIII
		Bangunan Perkuatan Tebing		Pembangunan Bronjong Dusun 1 Desa Kanawatu	
				Pembangunan Bronjong Desa Madani	Kec, Wotu
		Pembangunan Pintu air/Bendung Pengendali Banjir		Pembangunan Pintu Kleep Dusun Apala Desa Balo - Balo	
9	Nama PPTK : ISHWAN APRIANTO, ST			Pembangunan Bronjong Desa Pekaloa	V-c T- "
	Nip : 19840418 200902 1 003	Pembangunan Bangunan Perkuatan		Pembangunan Bronjong Dusun Wawomeusa Desa Wawondula	Kec. Towuti
	Pangkat/gol : Penata TK.1/III,a	Tebing		Pembangunan Bronjong RT 01 Dan RT 02 Dusun Balambano, Desa Balambano	Kec.Wasuponda
	Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha			Pembangunan Talud Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai	

8				1
8	Nama PPTK : BUDI UTOMO, ST Nip : 19820520 200803 1 001 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d Jabatan : Fungsional Teknik Pengairan	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Lanjutan Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Malili Pembangunan Bronjong Sungai La sio - Sio Dusun Puncak Indah	Kec. Malili
		Pembangunan Seawal Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainya Peningkatan Jaringan	Pembangunan Proteksi Sungai Angkona Desa Watang Panua Peningkatan Jaringan irigasi D.I Tawakua (DAK Penugasan) Pembangunan Talud Pantai Desa Pasi -	Kec. Angkona
		Irigasi Permukaan	Pasi Pembangunan Bronjong Dusun Marannu Desa Lambara Harapan	Kec. Malili
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bronjong Dusun 1 Desa Kanawatu Pembangunan Bronjong Desa Madani	Voc Met
		Pembangunan Pintu air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan Pintu Kleep Dusun Apala Desa Balo - Balo	Kec, Wotu
9	Nama PPTK : ISHWAN APRIANTO, ST Nip : 19840418 200902 1 003	Pembangunan Bangunan Perkuatan	Pembangunan Bronjong Desa Pekaloa Pembangunan Bronjong Dusun Wawomeusa Desa Wawondula	Kec. Towuti
	Pangkat/gol: Penata TK.1/III,b Jabatan: Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Tebing	Pembangunan Bronjong RT 01 Dan RT 02 Dusun Balambano, Desa Balambano Pembangunan Talud Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai	Kec.Wasupond
		Peningkatan Jaringan irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Dusun Tirowali Desa Timampu Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Libukan Mandiri Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Mahalona	Kec. Towuti
			Pembangunan Pintu Air Desa Rante Angin Pembangunan Pintu Air Dusun Lampangi Barat Rende-Rende Desa Parumpanai	Kec. Wasupond
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bantilang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Rante Angin	Kec. Towuti

Malili, 25 Januari 2022 Kabala Dinas

SYAHMUDDIN, ST., MT.
Pangkat : Penbina
Nip : 19760923 200312 1 005

Lampiran IV: Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selaku Pengguna Anggaran

Nomor: 3 Tahun 2022

Tanggal : 25 Januari 2022
Tentang Penetapan Pejabat

Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu

: Timur Tahun Anggaran 2021

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KEGIATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR

NO.	NAMA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	KET.
BIDA	NG JASA KONSTRUKSI				
1	Nama PPTK : Vidorosa Manukrante, ST Nip : 19880320 201503 2 004 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,b Jabatan : Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan tertib Pemamfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan tertip Pemamfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan tertip Pemamfaatan Jasa Konstruksi	
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Yerampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	
	Nama PPTK : Arvan, ST	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
2	Nip : 19801222 201101 1 006 Pangkat/gol : Ahli Muda /III,c Jabatan : Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Kontruksi	
3	Nama PPTK : Samiyem, SE Nip : 19700418 201001 2 001 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d Jabatan : Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	
BIGA	NG SUMBER DAYA AIR				
4	Nama PPTK: I KOMANG EDIWIJAYA, ST Nip:: 19870124 201101 1 006 Pangkat/gol: Ahli Muda/III,c Jabatan: Fungsional Teknik Pengairan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		
		Pengelolaan Sumber Daya Air	Perjalanan Dinas		
	Nama PPTK : Ishwan Aprianto, ST	Pengembangan dan	Operasional Unit Pengelola Irigasi	UPTD Pengairan Larona	
5	Nip : 19840418 200902 1 003	Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	Operasional Unit Pengelola Irigasi	UPTD Pengairan Kalaena	
	Pangkat/gol : Penata Muda Tk. I /III,b	dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	Operasional Unit Pengelola Irigasi	UPTD Pengairan Kalaena Kanan	
	Jabatan : Kepala Sub. Bagian UPTD Pengairan Larona	Kabupaten/Kota	Operasional Unit Pengelola Irigasi	UPTD Pengairan Kalaena Kiri	
BIDA	NG BINA MARGA				
	Nama PPTK : Abdul daffar, ST				
6	Nip : 19770901 201001 1 014	Pemyelenggaraan Jalan	Survey Kondisi		
	Pangkat/gol :Ahli Muda/III,c Jabatan :Fungsional Teknik jalan dan Jembatan	Kabupaten/Kota	Jalan/Jembatan		

NO.	NAMA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	KET.
7	Nama PPTK : Tintin Sumarni, ST Nip : 19771108 200604 2 004 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,b Jabatan : Fungsional Teknik jalan dan Jembatan	Penyelenggaraan Jalan	Perjalanan Dinas		
BIDA	NG CIPTA KARYA				<u> </u>
8	Nama PPTK: Halijah, ST Nip:: 19781109 200902 2 006 Pangkat/gol: Ahli Muda: /III,d Jabatan: Fungsional Teknik penyehatan Lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM Oleh Pemerintah Desa Dan Kelompok Masyarakat	Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM Oleh Pemerintah Desa Dan Kelompok Masyarakat	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Ilmbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air limbah Domestik	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Iimbah Domestik	
9	Nama PPTK : Agustinus Allu, ST Nip : 19820818 201101 1 011 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,c Jabatan : Fungsional Teknik tata bangunan dan perumahan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung diwilayah Daerah kabupaten/Kota Pemberian Isin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung	
			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Iimbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbag Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbag Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air limbah Domestik	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air limbah Domestik	
		Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum			
		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Perjalanan Dinas		
		Pengembangan permukiman			
SEVE	ETARIAT	Penataan bangunan gedung			
			Dogwood Dodge	D	
- 1	Nama PPTK : Muhammad Yusuf, ST Nip : 19910102 201503 1 003	Perencanaan, Penganggaran	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1	Pangkat/gol : Penata Muda Tk I/III,b	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Jabatan : Kasubag Perencanaan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
10			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	

NO.	NAMA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	KET.
9	Nama PPTK : Hasry, SE		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	Nip : 19721011 201001 1 008	F	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Pangkat/gol : Penata /III,c		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
BIDA	NG TATA RUANG				
40	Nama PPTK : SULIANTY, ST	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Konsultasi Evaluasi, dan penetapan RRTR kabupaten/kota		
10	Nip : 19740721 200604 2 009 Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d Jabatan : Fungsional Penata Ruang	Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang		

,

NO.	NAMA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	KET.
	Nama PPTK : Sumardi Allo Padang, ST Nip : 19760522 200902 1 003	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang		
11	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,d	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Sistem informasi penataan ruang		
	Jabatan : Fungsional Penata Ruang	kabupaten/kota	ruang		
	Nama PPTK : MAHARANI ANGGRAENI, ST		Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan		
12	Nip : 19860314 201001 2 035	pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota Ko	hukum bidang penataan ruang		
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,c		Koordinas pelaksanaan tata		
	Jabatan : Fungsional Penata Ruang		ruang		

Malili, 25 Januari 2022 Kepala Dinas

SYAHMUDDIN, ST.,MT.

Pangkat : Pembina

Nip : 19760923 200312 1 005

Lampiran V 🚼 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selaku Pengguna Anggaran

Nomor : 3 Tahun 2022 Tanggal : 25 Januri 2022

Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PENGADAAN BARANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB, LUWU TIMUR

NO.	NAMA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	KET.
SEK	ERTARIAT			1	
	Nama PPTK : Hasry, SE Nip : 19721011 201001 1 008 Pangkat/gol : Penata /III,c Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Sepeda Motor	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Pengadaan Kursi Staf, Lemari, Meja Makan	
1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Mesin Babat Rumput, AC 1 PK, AC 2 PK	
		Pra G	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gorddyn/Kray	
		Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Laptop, LCD, Printer	
	Nama PPTK : Agustinus Allu, ST Nip : 19820818 201101 1 011	Penyelenggaraan	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Pengadaan Amature Lampu	
	Pangkat/gol : Ahli Muda/III,c	Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pengadaan Suku Cadang PJU Lainnya	
	Jabatan : Fungsional Teknik tata bangunan dan perumahan	•	Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Tiang Lampu	
2		Pengenbangan Sisten dan		Pengadaan Kontainer Sampah	
		Pengolahan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Sampah	
				Pengadaan Truk Sampah	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dome s tik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Pengadaan Mobil Tinja	

Malili, 25 Januari 2022 Kegala Dinas

SYAHMUDDIN, ST.,MT

Pangkat : Pembina Nip : 19760923 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS KESEHATAN

Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981Telepon (0474) 321 489, Email :Umpagdinkes2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR: 440 / 35 /SK/DINKES/ 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dan pengadaan barang dan jasa Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menetapkan Revisi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa pegawai tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komimen (PPK);
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukkan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270):
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Begara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah

Kabupaten Luwu Timur Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 80);

MEMUTUSKAN

TENTANG KESEHATAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan KESATU (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam daftar lampiran keputusan ini:

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai KEDUA

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang jasa yang bendahara pengeluaran dan disampaikan oleh diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

b. menelti kelengkapan SPP-UP GU dan SPP-TU serta SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

c. melakukan verifikasi SPP;

d. menyiapkan SPM;

- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD;
- g. menyiapkan laporan keuangan;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai

a. menyusun perencanaan pengadaan:

b. melakukan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

d. menetapkan rancangan kontrak;

e. menetapkan HPS;

f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

h. melaksanakan E-purhasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

i. mengendalikan Kontrak;

j. menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dikumen pelaksanaan kegiatan;

k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA

l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; m. menilai kinerja Penyedia;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis KETIGA

bertanggungjawab kepada Pengguna (PPTK) Kegiatan

Anggaran/PA.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini KEEMPAT :

dibebankan pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan SK KELIMA

Nomor: 430/20/SK/DINKES/2022 dinyatakan tidak berlaku lagi, dan apabilah di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

diberikan kepada masing-masing yang Keputusan ini KEENAM

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili Pada tanggal, 17 Mei 2022 Kepala Dinas,

dr.Hj. ROSMINI PANDIN, MARS

Pangkat: Pembina TK I

Nip : 19690909 200112 2 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Luwu Timur

Nomor : 430/ 35 / SK/ DINKES /2022

Tanggal: 17 Mei 2022

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
0	NAMA	JABATAN		1
I	PURNAWATI DAVID, SKM. M.kes	PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN)		
		PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)	SUB KEGIATAN	
1	dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS	PPA (PEDADAT I BINDOTT TOTAL	1 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-
			2 Pengadaan Obat dan Vaksin	-
			3 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	+
0	ANDI TULLENG, SKM . M. Kes	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	SUB KEGIATAN	
2 AND	ANDI TOLDENG, SILIT . M. 100		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	
			4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
			7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

NAMA	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
		8 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		9 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
		10 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	EL PARTIE DE LA COMPANIA	14 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
		15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		16 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	THE RESIDENCE STREET,	18 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		19 Pengadaan Mebel	
		20 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	
		22 Penyediaan Jasa surat Menyurat	
		23 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
	REAL PROPERTY.	24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Pajak Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	
		26 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	
		27 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	
	MARKET MERCHANISM SERVICE STREET		

			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
NO	NAMA	JABATAN		
1	UTFI, SKM	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)/ PEJABATA PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	SUB KEGIATAN	-
3 10	Offi, sha		1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-
1			2 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-
1			3 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-
1			4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-
1			4 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-
-			5 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	-
-			6 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-
-			7 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-
			SUB KEGIATAN	
			Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
			2 Pengeloaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			3 Operasional Pelayanan Puskesmas	
			SUB KEGIATAN	
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kela C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	s
			KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	
-			1. Mobil Operasional Puskesmas (Avanza)	

KET

NAMA	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE'
		KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Meubel	
		1. Rak besi arsip Kantor	
		2.Kursi Tamu (Sofa)	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		1. Peralatan dan mesin pembabat rumput	
		2. Perlengkapan Media Online (Gimbal stabilizer)	
		3. Smart TV 60 Inchi Ruang Rapat (televisi)	
		4. Tas Kamera (Camera Backpack)	1
		5. Pengadaan laptop (Sekretariat)	
		6. Perlengkapan Media Online (Laptop)	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Belanja Modal Alat Pendingin	
		1. AC 1/2 PK	
		2. AC 1 PK	
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
		1. Bracket Standing Peralatan	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	T
		1. Admin Pengadaan Kendaraan Roda Dua dan Antopometri (Sepeda Motor)	1
		2. Kendaraan Roda Dua Petugas Puskesmas (Sepeda Motor)	
		3. Sistem Informasi Telemidicine (Micropone) Webcame Full HD	
		4. Sistem Informasi Telemidicine (Micropone) Headset dengan Micropone	1
		5. Sistem Informasi Telemidicine (P.C Unit) Komputer All In One	

NO NAMA	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Belanja Printer 1. Printer Foto Copy	
		Belanja Printer 1. Printer Foto Copy	
		1. Printer Foto Copy	
		ter t -ten Cahat	
		Belanja Rompi Kabupaten Sehat	
		1. Baju Kaos Olahraga	
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
		1. Belanja Modal Laptop	
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		Belanja Baju Rompi Team STBM	
		1. Baju Kaos Olahraga	
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		1. Belanja Printer	
4 NELLI MUALIM, SKM PPTK (PEJABAT PE	AKSANA TEKNIS KEGIATAN)	SUB KEGIATAN	
		1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
		2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		3 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
		SUB KEGIATAN	
		1 Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
		3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
		4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	

KET

0	NAMA	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
+	All and a second		5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			SUB KEGIATAN	
			1 Pengeloaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
5	WARDAN, SKM	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	SUB KEGIATAN	
			1 Pengeloaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
			4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			SUB KEGIATAN	
			1 Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			2 Pengelogan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
			4 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			SUB KEGIATAN	
			1 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	-
NAMA	JABATAN		
Маша		SUB KEGIATAN	
MASYHURI RACHIM,	. Si PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	A. Pameliharaan Alat Kalibrasi	
MASYHURI RACIIIM,	PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)	Ol + Valsain Bahan Medis Habis Pakai, (BMRF), Makanan das	
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
		6 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	
		KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Sub Kegiatan : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		1. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya: (Laptop)	
		Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
		Beban pakaian dinas dan atributnya lainnya (pakaian dinas lapangan (Pokja Kabupaten)	1

Kepala Dinas

dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS PANGKAT: PEMBINA TK I

NIP: 19690909 200112 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malifi KM 1 No. Telf/Fax 0474-321 408 HP. 085711393092/085394213178

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 03/1/ Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;;\
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103):
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13 :
- Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80;

Memperhatikan:

- Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 3 / F-04 / I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 4 / F-04 / I / Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU

: Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampiran dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA

PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja, yaitu:

- Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 dan
 - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

- 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
 - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - 3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Malili Pada tanggal, 3 Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KARUPATEN LUWU TIMUR

ELAKURENGGUNA ANGGARAN,

angkat Pembina utama Muda 196502101993031015

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
- 2. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- 3. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- 4. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- 5. Yang bersangkutan masing-masing di tempat;

LAMPIRAN SOSIAL DINAS **KEPALA** KEPUTUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN SELAKU ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 01/ I/ TAHUN 2022 PELAKSANA PEJABAT TENTANG PENETAPAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR **TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

No	Daftar Nama PPTK	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Nama: IMRONIH, SP NIP: 196605191991031007 Pangkat/Gol.: Penata TK I / III-d	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	
	r angitabook. T chata Tit Ti m-q		Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
			Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
2	Nama : TAMRIN WAHYUDI, ST NIP : 198006162011011011	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pangkat/Gol.: Penata TK I/III-d	Daeran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

			Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	
		1	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
3	Nama: MUH. RAHMAT R, S.SOS NIP: 196411251986021003 Pangkat/Gol.: Pembina /IV-a	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Penyediaan Permakanan	
		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
		sosial	Pemberian Bimbingan sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	

1.	NIP :	RANU, S.Sos 197905032011011011 Penata TK I/III-d	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
5	NIP :	Hj. JULAEHA TALIB, AMd.Keb 196610071987032006 Pembina / IV-a	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,sosial dan Ekonomi		
		pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi		
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan data gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten/kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan dunia Usaha Kewenagan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Hak anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenagan Kabupaten/Kota	

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kbupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
6	Nama : Hj. FIRAWATI, S.Sos NIP : 197603222010012010 Pangkat/Gol. : Penata /III-c	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan Sarana dan Prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Kordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. SUKARTI

Pangkat Pembina Utama Muda NIP 196502101993031015



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Soekarno Hatta No Telp. (0474) 321423, Fax. (0474) 321423

MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Menunjuk/mengangkat PPTK di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:

- mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
- menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimaa mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 07 Januari 2022

KEPALA DINAS

SELAKU PENOGUNA ANGGARAN

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19751001 199612 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECI MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

No	Daftar Nama PPTK	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Nama : ALVIANI, ST NIP : 19800508 201101 2 005 Pangkat/Gol.: Penata Tk I, III/d Jabatan : Kasubag. Perencanaan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.	Nama : ZAENAB, SE NIP : 19741208 200902 2 004 Pangkat/Gol. : Penata Tk I, III/d Jabatan : Kasubag. Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwuanan/Semesteran SKPD	
3.	Nama : SARBAH,S.Sos NIP : 19720630 200212 2 004 Pangkat/Gol.: Penata Tk I, III/d Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaewaian
	Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan
		Tugas dan Fungsinya
		Bimbingan Teknis Implementasi
		Peraturan Perundang-undang
	Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan Komponen Instalasi
	Daerah	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan
		Perlengkapan Kantor
V		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan
		Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan
		Peraturan Perundang-undang
		Fasilitas Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
		dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada
		SKPD
	Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Mebel
	Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Peralatan dan Mesin
	Pemerintah Daerah	Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
		Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
		Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
	Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan Pajak, dan Pirizinan
	Pemerintahan Daerah	Kendaraan Dinas Operasional atau
		Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
		Lainnya

			Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung	
			Kantor dan Bangunan Lainnya	
4.	Nama : I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA, M.Si NIP : 19750719 200604 1 019 Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a Jabatan : Kabid. Koperasi	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pengawas Kekuatan, Kesehatan,	
		Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Dae rah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pendidikan dan Pelatihan Perkoprasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambahan, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
5.	Nama : PATMAWATI, S. Kom NIP : 19830828 201001 2 043 Pangkat/Gol. : Penata, Tk I, III/d	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,	Pendataan Potensi danPengembangan Usaha Mikro Pemberdayaan Melalui Kemitraan	
	Jabatan : Kabid. UMKM	Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	Usaha Mikro Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha	

			,
		Koordinasi dengan Pemangku	Mikro Pogoza Potensi
		Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi
			dan Pengembangan Usaha Mikro Koordinasi dan Sinkronisasi dengan
			Roordinasi dan Sinkronisasi dengan
			Para Pemangku Kepentingan dalam
		Pengambangan Hasha Mikra	Pemberdayaan Usaha Mikro Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan	Kecil dalam Pengolahan, Pemasaran,
		Skala Usaha Menjadi Usaha	SDM, serta Desain dan Teknologi
		Kecil	SDIVI, Seria Desairi dari Folkiores
6.	Nama : ANDI TENRIAWARU, ST.MT	Pembangunan dan	Penyediaan Sarana Distribusi
	NIP : 19800929 200902 2 007	Pengembangan Sarana	Perdagangan
	Pangkat/Gol.: Pembina, IV/a	Distribusi Perdagangan	
	Jabatan : Kabid. Perdagangan	Pembinaan Terhadap	Pembinaan dan Pengendalian
		Pengelola Sarana Distribusi	Pengelola Sarana Distribusi
		Perdagangan Masyarakat di	Perdagangan
		Wilayah Kerjanya	
		Pengendalian Harga, dan Stok	Pemantauan Harga dan Stok Barang
		Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Pasar Kabupaten/Kota	pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi
		r asar Nabupater/Nota	dalam Sistem Informasi Perdagangan
			Pelaksanaan Operasional Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang
			Berdampak dalam 1 (satu)
			Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pupuk dan	Pengawasan Penyaluran dan
		Pestisida Bersubsidi di Tingkat	Penggunaan Pupuk dan Pestisida
		Kabupaten/Kota	Bersubsidi
		Penyelenggaraan Promosi	Pembinaan dan Pengembangan Usaha
		Dagang Melalui Pameran	Produk Ekspor Unggulan
		Dagang dan Misi Dagang Bagi	Kabupaten/Kota
		Produk Ekspor Unggulan yang	
		Terdapat pada 1 (satu) Daerah	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		Kabupaten/Kota	Unggulan
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

7.	Nama : H. HASIMNING, ST.MM NIP : 19730826 200312 1 002	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Penyusunan dan Evaluasi	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Koordinasi, Sinkronisasi, dan	
	Pangkat/Gol.: Pembina, IV/a Jabatan: Kabid. Perindustrian	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUL, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	

KEPALA DINAS

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19751001 199612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Soekarno - Hatta Telp./Fax 0474 - 321371 Website : dlh.luwutimurkab@gmail.com

MALILI

Kode pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR (88.4 / 64 /SK/DLH/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Kelancaran Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - bahwa mereka yang disebut namanya dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberang keli terakhiri.

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- 7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
- 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 80);
- 11 Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah tahun Anggaran 2022;
- 12 Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum namanya pada kolom 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut:

a. sebagai Koordinator dalam Pelaksanaan Kegiatan;

b. menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pelaksanaan Kegiatan;

c. menetapkan rencana pelaksanaan meliputi:

Spesifikasi Teknis Barang / JasaHarga Perkiraan Sendiri (HPS)

d. menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;

e. menandatangani Kontrak;

f. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;

g. mengendalikan Pelaksanaan Kontrak; dan

h. menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili Pada Tanggal 3 Januari 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Drs ANDI MAKKARAKA,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda NP. : 19650406 198603 1 017

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR (684) 64 /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA-NAMA PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN (PPTK)
1	2	3	4
	RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEI		图1. 上京里接受上海。
Peren	canaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perang	kat Daerah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,255,000	NASIR, SP., M.Si
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,778,000	NASIR, SP., M.Si
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,298,000	NASIR, SP., M.Si
4	Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	15,870,000	NASIR, SP., M.Si
Admi	nistrasi Keuangan Perangkat Daerah		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,946,278,996	NASIR, SP., M.Si
б	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	47,100,000	NASIR, SP., M.Si
Admi	nistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera	th	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18,855,675	NASIR, SP., M.Si
Admi	nistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14,206,540	NASIR, SP., M.Si
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31,600,000	NASIR, SP., M.Si
Admi	inistrasi Umum Perangkat Daerah		
11	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1,348,315	NASIR, SP., M.Si
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,268,000	NASIR, SP., M.Si
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,349,000	NASIR, SP., M.Si
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	3,600,000	NASIR, SP., M.Si
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,820,000	NASIR, SP., M.Si
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155,562,000	NASIR, SP., M.Si
Peny	ediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,473,520	NASIR, SP., M.Si
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,139,768	NASIR, SP., M.Si
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52,200,000	NASIR, SP., M.Si

g Urusan Pemerintah Daerah	AMA PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN (PPTK)		
peliharaan			
neliharaan, 46,100,000			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 46,100,000 NASIR, SP., M.S			
a 8,000,000	NASIR, SP., M.Si		
dan 11,208,600	NASIR, SP., M.Si		
rategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Name and A continued and the same and the sa		
na Tata 193,082,115	ABSHAR ABDUR RAZAK, SP		
ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	HIDUP		
Lingkungan Hidup Kab/Kota			
up 86 570 000	esti purwaningsih, s.si		
lup 423,095,768	KASMAHATIR, SE		
ingkungan Hidup Kabupaten/Ko	ta		
	ESTI PURWANINGSIH, S.Si		
ten/Kota			
62,683,320	SUPARMAN, S.A.P		
DAN BERACUN (LB3) DAN LIMBA	AH BAHAN BERBAHAYA DAN		
lui Sistem	SUPARMAN, S.A.P		
HADAP IZIN LINGKUNGAN DAN	IZIN PERLINDUNGAN DAN		
dan/atau Kegiatan Yang Izin Li	ngkungan dan Izin PPLH diterbitke		
yiban Izin 16,200,000	ABSHAR ABDUR RAZAK, SP		
ng Izin kan oleh 20,130,000	ABSHAR ABDUR RAZAK, SP		
.H	ABSHAR ABDUR RAZAK, SP		
AKAT HUKUM ADAT (MHA), KEA	RIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG		
Tradisional dan Hak MHA yan	g Terkait dengan PPLH		
	ESTI PURWANINGSIH, S.Si		
	rategis (KLHS) Kabupaten/Kota na Tata 193,082,115 ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN Lingkungan Hidup Kab/Kota up 86,570,000 dara dan 423,095,768 Angkungan Hidup Kabupaten/Ko 39,998,000 ten/Kota 62,683,320 A DAN BERACUN (LB3) DAN LIMBA upanan lui Sistem i Secara 23,350,000 the Secara 23,350,000 A dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Izin 16,200,000 ang Izin kan oleh 20,130,000 dan 35,084,000		

			nama pejabat pelaksana tekhni			
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KEGIATAN (PPTK)			
ROGR	RAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN LINGKUGAN HID	UP UNTUK MASYARA	IKAT			
embe	rian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daei	rah Kabupaten/Kota				
33	Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengclolaan Lingkungan Hidup	11,827,431	esti purwaningsih, s.si			
PROG	RAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDU	P	The language Hidup (PPLH)			
Penye	RAM PENANGANAN PENGADUAN EMGADUAN desaian Pengaduan Masyarakat di Budang Perlindi paten/Kota	ıngan dan Pengelolo	ian Lingkungun Maap (***********************************			
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	10,340,000	ABSHAR ABDUR RAZAK, SP			
PROC	GRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
Peng	elolaan Sampah					
35	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPAkabupaten/Kota	3,304,447,200	DARIUS OTTO, SKM			
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	115,730,000	DARIUS OTTO, SKM			
37	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	23,170,000	SUPARMAN, S.A.P			

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SELAKU P PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. aNDI MAKKARAKA,M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19650406 198603 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA

Jln. Soekarno Hatta No. 04 Puncak Indah Malili

MALILI 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR:59 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menujuk/menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi kedudukan tugas fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022
- Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
 - Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, meliputi :
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas kewajiban dalam kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menjadi Tim Pendukung yang membantu Pengguna Anggaran dengan tugas :

- 1. Menyiapkan penyusunan perencanaan pengadaan:
- Menyusun dan menyiapkan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 3. Menyiapkan pengusulan perubahan jadwal kegiatan;
- 4. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- 5. Menyusun dan menyiapkan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan;
- 6. Menyusun dan menyiapkan dokumen menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan:
- 7. Menyiapkan dokumen penilaian kinerja;
- 8. Menyiapkan penetapan tim pendukung;
- 9. Menyiapkan penetapan tim ahli atau tenaga ahli;
- Menyiapkan penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan;

KEEMPAT

Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.

KELIMA

Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEMPAT di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 diyatakan tidak berlaku lagi dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 25 April 2022

Kepala Dinas PMD, Selaku

Pengguna Anggaran

HALSEN, S.IP.MM NIP. 19720424 199203 1 004 LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor

: 50 Tahun 2022

Tanggal: 25 April 2022

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN / PENUGASAN
1.	Erwin, ST	Sekretaris DPMD	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	91		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Kegiatan : Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
			Sub Kegiatan :
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		and the second	Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesterar SKPD

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penatausahaan Badan Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik
 Kantor
- 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Pelayanan
 Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Pemeliharaan Kegiatan dan Mesin Lainnya.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2.	MUZAKKIR, S.Ag	Kahid Kalambagaan Dasa	S
		Kabid Kelembagaan Desa	Pejabat Pelaksana Teknis
		dan Pemb. Masyarakat	Kegiatan pada :
			Kegiatan : Pemberdayaan
			Lembaga Kemasyarakatan yang
			Bergerak di Bidang
	9		Pemberdayaan Desa dan
		'	Lembaga Adat Tingkat Daerah
			Kabupaten/Kota Serta
			Pemberdayaan Masyarakat
			Hukum Adat Dalam Masyarakat
			Pelakunya Hukum Adat yang
			sama dalam Daerah
		7.	Kabupaten/Kota.
			Sub Kegiatan :
			Fasilitasi Penataan ,
			Pemberdayaan dan
			Pendayagunaan
			Kelembagaan Lembaga
	-		Masyarakat Desa/Kelurahan
		1	(RT,RW,PKK,Posyandu,LPM
	14.		dan Karang Taruna),
			Lembaga Adat
			Desa/Kelurahan/Masyarakat
1			Hukum Adat.
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
			Penyelenggaraan Gerakan
			Pemberdayaan Masyarakat
			dan Kesejahteraan Keluarga.
			Kegiatan : Pembinaan dan
			Pengawasan Penyelenggaraan
			Administrasi Pemerintahan Desa
			Sub Kegiatan :
	y.e.		Pembinaan Peningkatan
			Kapasitas Anggota BPD
2.	I Wayan Sudino,	Kabid Penataan Desa	Pejabat Pelaksana Teknis
2.	SE.,MM	Table Foliataan Desa	Kegiatan pada
	GE.,IVIIVI		
			Kegiatan : Penyelenggaraan
			Penataan Desa
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sub Kegiatan :
			1. Pembentukan
			,Penghapusan
			Penggabungan dan
			Perubahan Status Desa
		1	

			Kegiatan :Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 6. Fasilitasi Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa 7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
3.	Hj Sitti Nurhaeni, BA	Kabid Pegembangan SDM dan SDA	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
			Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

	Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
--	---

Ditetapkan di : Malili Pada Tanggal : 25 April 2022

Kepala Dinas PMD Selaku Pengguna Anggaran

HALSEN, S.IP.MM NIP. 19720424 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR INSPEKTORAT

Jl. Sockarno Hatta, Desa Puncak Indah Email: inspektoratlutim@gmail.com MALILI, 92981

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 02 /I/TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
- Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 3/F-04/I/TAHUN 2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04/I/TAHUN 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

١

Menetapkan kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

: Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili ada tanggal, 14 Januari 2022

INSPEKTUR,

Pangkat; Pembina Utama Muda N I P:19690403 198903 1 007

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;

Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;

3. Yang bersangkutan;

4. Pertinggal:

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 02 / I / TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA INSPEKTOPAT
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA BUB KEGIATAN
ALAMSYAH PERKESI	SEKRETARIS	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	 Penyediaan Gaji dar Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunar Laporan Keuangar Bulanan/Triwulan/semeste an SKPD
		2. Perencanaan,Pen ganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaar inspektorat Koordinasi dan penyusunar RKA-8KPD Koordinasi dan penyusunar
		2 Administraci	DPA-SKPD 4. Evaluasi kinerja perangka daerah 1. Pendataan dan pengolahai
		Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian 2.Pendidikan dan pelatiha pegawai berdasarkan tuga dan fungsi
			3.Sosialisasi peratura perundang-undangan 4.Bimbingan tekni implementasi peratura perundang-undangan
		4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan kompone intalasi listrik/peneranga bangunan kantor Penyediaan peralatan da
	·		perlengkapan kantor 3. Penyediaan Bahan logisti kantor 4. Penyediaan barang cetaka dan penggandaan
			 5. Penyediaan bahan bacaa dan peraturan perundang undangan 6. Fasilitasi kunjungan tamu 7. Penyelenggaraan rapa koordinasi dan konsulta
		5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	SKPD 1. Pengadaan kendaraan dina
		NAMA/PANGKAT/NIP JABATAN	NAMA/PANGKAT/NIP ALAMSYAH PERKESI SEKRETARIS 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Perencanaan,Pen ganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.Pengadaan Barang Barang Milik Daerah Penunjang

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atu kendaraan dinas jabatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan
lainnya
1. Pengawasan kinerja pemerintah daerah 2. Pengawasan keuangan pemerintah daerah 3. Reviu laporan kinerja 4. Reviu laporan keuangan 5. Pengawasan desa 6. Kerjasama pengawasan internal 7. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
1. Pengawasan dengan tujuan tertentu
 Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah Pendampingan,asistensi,veri fikasi dan penilaian reformasi birokrasi Koordinasi,monitoring dn evaluasi serta verifikasi

INSPEKTUR,

Pangkat: Pembina Utama Muda NIP: 19690403 198903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN ANGKONA

Jl. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos 92985 e-mail: kec-angkona@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG BAT PELAKSANA TEKNIS

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT ANGKONA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Angkona, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Angkona Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Angkona.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 5 Tahun 2009;

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
- 10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENGANGKAT PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Angkona Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini:

KEDUA : Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

3. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

4. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Angkona Tahun Anggaran 2022;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KECAMATA

Ditetapkan di Angkona pada tanggal 07 Januari 2022

NIP. 19880221 200701 1 001

Tembusan:

KETIGA

KEEMPAT

- 1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
- 2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
- 3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
- 4. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili;

5. Yang bersangkutan masing-masing ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA KANTOR CAMAT ANGKONA TAHUN
ANGGARAN 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT ANGKONA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan	Sub Kegiatan
1	MULYONO NIP. 19761225 200604 1 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2	NASBA, S.Sos NIP. 19740303 201001 1 008	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

			18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	KOMBONG ALLO, SP NIP. 19780505 201409 2 001	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
4	AGUS SASMIANTO, SE NIP. 19830818 201001 1 017	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
5	MARTHA TO'MASSANG NIP. 19650529 198703 2 001	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
6	SAINUDDIN KAPENG, ST NIP. 19680128 200801 1 007	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Peundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN TOMONI

Alamat : Jln. Pamong Praja No. 02 Telp. (0473) 25101 Kode Pos : 91972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT TOMONI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Camat Tomoni tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
- 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

: Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaraan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomoni

Pada Tanggal 05 Januari 2022

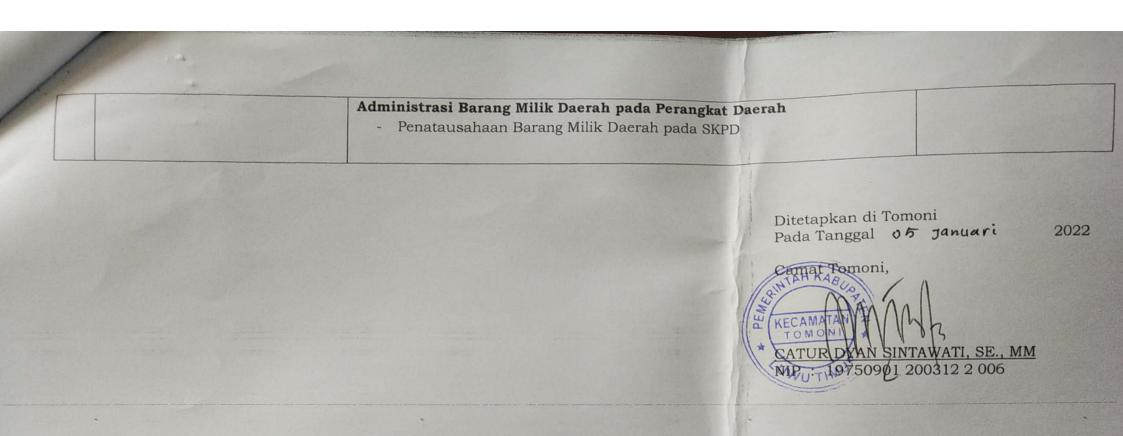
CATUR DYAN SINTAWATI, SE., MM NIP, TIM 19750901 200312 2 006 LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KANTOR
KECAMATAN TOMONI TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN/NAMA/NIP	URAIAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah	
		Perencanaan Pembangunan di Desa	PPTK
	KASI, PMD	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	
1	SURNAENI, SP	Kecamatan	
	NIP. 19701105 200701 2 021	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	
	13, 61100 200, 61 2 021	Pemerintah Desa	
		- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	
		Kecamatan	
		- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	
	KASI.PEMERINTAHAN UMUM ANITA TRIHAYATI, S.Sos NIP. 19850110 200312 2 003	Daerah	PPTK
		- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	
		Pemerintah Desa	
		- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	
	KASI. TRANTIBUM	Pemerintah Desa	
	PERDI	- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PPTK
	NIP. 19731112 200312 1 007	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	
		Kepala Daerah	

		- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	
		Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
1		dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	
		Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan	
	KASI. PELAYANAN UMUM	Lain yang Dilimpahkan	PPTK
4	EVIANI, S.Sos	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
	NIP. 19721230 200112 2 002	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
		- Fasilitasi Pelayanan di Kecamatan	
		- Peningkatan Pendapatan Daerah	
		Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	
		Daerah	
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
5	KASUBBAG. PERENCANAAN	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PPTK
	DAN KEPEGAWAIAN	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	TARA OEDY MELATI, S.STP	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	NIP. 19950224 201609 2 001	- Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	
	A CHARLES TO THE PARTY OF THE P	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	KASUBBAG. UMUM DAN	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	
6	KEUANGAN	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	PPTK
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	NIP. 19840414 201101 1 012	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitas Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN MANGKUTANA

Jalan Kasuari No. 2 Wonorejo 92973 Email :

KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) LUNGKUP KANTOR CAMAT MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

KANTOR CAMAT MANGKUTANA,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Ri Tahun 2013 Nomor 1425);
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310; •
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuagan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 1425);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103);
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan:

PERTAMA

Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA

Pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas masing-masing sebagai berikut: Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meliputi:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mangkutana Pada Tanggal : 5 Januari 2022

Camat Mangkutana,

Dra. SRI MULYANI, M.SI

Pangkat Pembina Tk.I 19490227 199710 2 001

Tembusan Yth,;

- 1. Bupati Luwu Timur di Malili;
- 2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
- 3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
- 4. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili; 5. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili
- 6. Kapis, Perpustakaan dan Kebriaan Kabi Lawa Tan P

Dipiniaai aciigaN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2022

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT MANGKUTANA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	SUB KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB/PPTK
1.	 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	Meri, S.Pi Penata Tk. I, III/d NIP. 19781005 200801 2 019
2.	 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN' Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 	Samuel N, S.IP Penata Tk. I, III/d NIP. 19791112 200604 1 008
3.	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samuel N, S.IP Penata Tk. I, III/d NIP. 19791112 200604 1 008
4.	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samuel N, S.IP Penata Tk. I, III/d NIP. 19791112 200604 1 008
5.	 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 	Meri, S.Pi Penata Tk. I, III/d NIP. 19781005 200801 2 019
6.	 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	Samuel N, S.IP Penata Tk. I, III/d NIP. 19791112 200604 1 008
7.	 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	Samuel N, S.IP Penata Tk, I, III/d NIP, 19791112 200604 1 008
8.	 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	Samuel N, S.IP Penata Tk. I, III/d NIP. 19791112 200604 1 008

Dipindai dengan (

9.	 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	Samuel N. S.IP Penata Ik. I, III/a NIP. 19791112 200604 1 008
10.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha .	Warsi Salipadang,SE.M.Si Penata Tk. I, III/d NIP. 19701209 200901 2 002
11.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Samuel N, S.IP Penata Tk. I, III/d NIP. 19791112 200604 1 008
12.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Hermonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Risman Amir,S.Pd Penata Tk. I, III/d NIP. 19641016 198503 1 008
13.	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Risman Amir,S.Pd Penata Tk. I, III/d NIP. 19641016 198503 1 008
14.	Peláksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecarnatan	Dormawati, SE Penata Tk. I, III/d NIP. 19701024 199303 2 005
15.	- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Darmawati, SE . Penata Tk. I, III/d NIP. 19701024 199303 2 005
16.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan	Samuel N, S.IP Penata Tk. I, III/d MIP: 19791112 200604 1 008

amat Mangkutana,

Dra. SRI MULYANI, M.Si Pangkcit: Pembina Tc.I NIP: 19690227 199710 2 001

Dipindai dengan (



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

JI Soekarno Hatta Puncak Indah , Malili, 92981, E-mail : luwutimurdamkar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 038 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

- a bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur (Lembar Edaran Nomor 21 Tahun 2021)
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

- 10. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Berita Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur.
- 11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 / F-04/ I / tahun 2022 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4/ F-04 / I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya Tahun Anggaran 2022.

Menetapkan PERTAMA

MEMUTUSKAN:

KEDUA

Menunjuk / mengangkat PPTK di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:

mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:

a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

- melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran
- menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:

a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang diletapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan

c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan Kepala Dinas Nomor 008 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dicabut dan tidak berlaku lagi sejak terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam

KELIMA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2022, sesuai Peraturan Perundang –

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana

> Ditetapkan di Malili Pada tanggal, 01 September 2022 KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19660502 200003 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 038 TAHUN 2022 TANGGAL 05 September 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PPTK EERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Data: Halla I I II	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1	Nama : MUH. ASRI, S.Hut NIP : 19840428 200502 1 001 Pangkat/Gol: Penata Tk. I Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
2	Nama : BURHANUDDIN, SH NIP : 19701001 199703 1 006 Pangkat/Gol: Pembina Jabatan : Sekretari Damkar dan Penyelamatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
3	Nama : IRAWATI, SH NIP : 19790905 200604 2 010 Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	

Administrasi Umum Perangkat Daerah Renyeri (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyelamatan) Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyelamatan) Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyelamatan) Penyelamagan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuliasi SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuliasi SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Pasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	_				
Rebakaran dan Penyelamatan			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunar Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Permadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Permadam Kebakaran dan Penyelamatan) Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Permadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Permadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyelamatan) Pengadaan Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)			-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pem≥dam Kebakaran dan Penyelamatan)	
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Jabatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
undangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Fasilitasi Kunjungan Tarmu (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Jabatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Feralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		1		Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	ł
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Jabatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)					
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyelamatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Penyelamatan (Dinas Pemadam Mesin Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)					1
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Jabatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penye-iamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)					
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Jabatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penye-iamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	_				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Jabatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penye:amatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
Pengadaan Sarana dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan			-	Kebakaran dan Penyelamatan)	
Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan				Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
latau Bangunan Caminya (Dinas Pemadam Kehakaran dan				Penyelamatan)	
			ļ¢	alau bangunan cannya (Dinas Pemadam Kebakaran dan 🔠	i i

4	Nama : BURHANUDDIN, SH NIP : 19701001 199703 1 006 Pangkat/Gol: Pembina Jabatan : Sekretari Damkar dan Penyelamatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Jasa Kemunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
5	Nama : IRAWATI, SH NIP : 19790905 200604 2 010 Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
6	Nama: ANDI RAHMAT RESKI, S.STP NIP: 19860419 200412 1 001 Pangkat/Gol: Pembina/IV a Jabatan: Kabid Pencegahan	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	

1				
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Pencegahan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
7	NIP: 196601002 198703 1 011 Pangkat/Gol: Penata Tk I / III d Jabatan: Kabid Pemadaman, Penyelamatan dan	Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
		i G F	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	

	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

dr. ADNAN

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19660502 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jln. Soekarno - Hatta No. Telp. (0474) 321468, Fax. (0474) 321468 E-Mail: disnakertranslutim@yahoo.com

MALILI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR: ∞ /I/ 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR.

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab I huruf E angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Program dan kegiatan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode Fikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
- 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 80);
- 10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/TAHUN 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

- 5. Perotulan Menteri Daloui Negeri Neraor 90 Tahun 2019 terrang Klassfikasi, kode Fikasi dan Nemenklutur Purun andan Pembangunan dan Keraugan Daerah;
- 6. Peracuran Deerah Kebupaten Luwu Thaur Numor 13 Thun 2024 Temang Anggaran Pendapawa dau Belanja Daerah babupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
- 7 Penducan Daerah Kabupaten Luwu Timui Nodor S T. hun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pera igkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupater Luwu Timua Tahum 2016 Nomoz 8, Talahah Lembaran Userah Kabupaten Luwu Timui Nomoz 303);
- Recaturan Bupati Nomor 37 Tabya 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigram Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
- 9. Feraturan Bupeti Luwe Timur Nomer Su Tahun 2021 tentang Penjaberan Anggerian Pendenatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Kemer 80);
- Kepulusan Bupan Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/TAHUN 2022 tentang Pelmyahan Sebasian Kekuasaan Bupati Musaca Pojapat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 11. kapitetsan Bupati buwu Timur Nomor 4/F-04/1/Tahun 2022 tanang Pelimpahan Kewanangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2002

MEMITUSKAN

Mondapken: KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS LISCIATAN PADA DINAS TRANSMEGRASI DAN TENAGA KERUPATEN LUWU TEMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatra pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten buwu Timur Tahun Anggaran 2022, sebagaimana termotum dalam bappiran yang merupakan bagian tidak terpesahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA . Pejabat Pelaksana fakuis Kegiatuu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menapanani mugas sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pelaksenaan kegutaus
- h. Mekaparkan perkombancan celaks maka krujukan dan

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belaja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili Pada Tanggal 14 Januari 2022

KEPALA DINAS,

KAMAL RASYID, S.STPPangkat :Pembina Utama Muda
Nip. 19810511 199912 1 002

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;

2. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;

3. Yang bersangkutan;

4. Pertinggal;

 Menyiapkan dokumen anggaran atal beban penseluatan pelaksanaan kegiatan.

ADDIVE

Sigaia biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksaman Keputusan Kepala Dibus Transmigrasi dan Eduaga kerja tul dibebankan pada anggaran pundabatan dan belaja daerah melahi dokuman pelaksanaan angaran saman kerja peranakat daerah Dibas Tensmigrasi dan Tensga Kerja Kebupaten Luwu Tensur Tabun Anggaran 2022:

KERMIPAT

Reputation Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Daetapkan di Mulili Peda Tanggal 14 Januari 2022

NEPALA DINAS.

KAMAL RASYID, S.STP

Pimekas Pembina Utama Mude Nap. 19819811 199912 1 002

Tembursan

1. Bursh Luwu Timur (sebagai Japaran) di Mahin

2 Kengla BiCAD Lab Lawu Tempadi Malifi

3. Yang bersangkulan

4 Pertingent:

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KAB. LUWU TIMUR

NOMOR: 02 / I / 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS

TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. LUWU TIMUR

No	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	JENIS KEGIATAN
1	2	3	4
1.	JONI PATABI, S.Sos NIP.19740611 200604 1 012	Sekretaris Dinas	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			8. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
			9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD
			10. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			12. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

AMPIRAN

KER BUSAN KERALA DER KERANGER ANDER GRAST BANK BESART DA

KABLEIWE TIMER

NOMORE II / L. 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJARAT PELAKSANA TEMNIS KEGIATAN (PETK) PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TEMNIS KERIA KASUPATEN LUVU BANDR

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KECIATAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB, UBWU TIMBR

JENIS KEGIATAN	JAHATAN	NAMA / NIF	
4			
Penyusunah Dokomen Peranganah Perangkot Daerah	Sekretaris Dinas	TONEPATABL, S.Scs. NBP.19740611 200604 1 012	
Dekumen RKA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Parubahan PEA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan OPA-SAPD			
Roordinasi dan Penyusunan Perunahan DPA-SKPD			
Koordinesi dan Penyusunan Laporan C. baikh kinerja dan Ikhnsar Redibasi Kineror SKPD			
Evaluasi kinerja Perangkat Daerah			
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN			
Koerdinasi dan Penyusunan Laporan Kedangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n 5KPD			
Rekonsilies den Penyusunan Laporan Burang Milik Daerah pada SKPD			
Pénatausanaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			

37				
7.			13.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			14.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			15.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			16.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
			17.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			18.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
			19.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			20.	Pengadaan Mebel
			21.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			22.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			23.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
			24.	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
			25.	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			26.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			27.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	NASRULLAH, SP, M.Si NIP. 19721007 200003 1 004	Kepala Bidang Hubungan	1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
		Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan

				10
Bimbingan Teknis Implementasi Peratui in ^D erundang-Undangan	13.			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerankan Bangunan Kanter	14.			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	16.			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.			
Fasilitasi Kunjungan Tamu				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.			
Pengadaan Mebel				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	.15			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	23.			
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.			
Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.			
Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.			
Pemeliharaun/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.			
Pengesahan Peraturan Perusahaan pagi Perusahaan		Kepala Bidang Hubungan	NASRULLAH, SP, M SI NIP. 19721007 200003 1 004	2.
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sarta Pengunahan	2.	Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
Serta Pengupahan				

3-7				
	,		3.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			4.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			5.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi
			6.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
			7.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
3.	H. UMAR, ST, M.Si NIP.19730714 200003 1 002	Kepala Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan	1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
			2.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
			3.	Perluasan Kesempatan Kerja
			4.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
			5.	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
4.	RAKHSAN.R, S.Sos NIP. 19800807 200103 1 002	Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	1.	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
		J. 22	2.	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Hubungan Industrial Negok Regia, dan Pendugan Perusahaan vang Rabioademinok pada Rabioademinok Regeningan (if (earl) Diseran Hubungan Laucital, Mogok Perusahaan vang Redenindursah Kangobaan Nada Redenindursah Redenindurs	Pencegahan Perselisihan	3.			,	• • • •
Perusahaan yang Berakhayi Bertampaik pada Berakhayi Bertampaik pada Berakhayi Bertampaik pada Albaharian Magah Tanushrat, Magak Berakhayan Pendudungan Tanushrat, Magak Berakhayan Pendudungan Tanushrat, Magak Berakhayan Pendudungan Tanushrat, Magak Berakhayi Berakhayan Pendudungan Tanushrat, Magak Berakhayi Berakhay						
Berakkau Berat minak pada kabunatur Mcku Perseaana Perselahan Hubungan haratahan Perseaana Perselahan Perseaana Perselahan Perseaana Perselahan Perseaana Persebagai						
Kaperlogan (to 1 (satu) Dasial Kabusatan/kota Hubungan Inaustral, Magak Kari dan Peratejahan Perselahan P						
Replace Replace Representation						
4. Pernyesaan Persishtan Hubungan Industrial, Mogok Kepia dan Pendupan Bernahadan yang Bernahadan yang Bernahadan yang Bernahadan yang Bernahadan Pandupaten/Mota Darrah Kabupaten/Mota Darrah Kabupaten/Mota Bernahadan Pandungan Pada Bernahadan Persishanan Darrah Kabupaten/Kora Darrah Kabupaten/Kora Darrah Kabupaten/Kora Bernahadan Pelaksanaan Darrah Kabupaten/Kora Bernahadan Pelaksanaan Bernahadan Pelaksanaan Bernahadan Pelaksanaan Bernahadan Pendungan Bernahadan Bernahadan Pendungan Bernahadan Bernahadan Pendungan Bernahadan Bernahad						
Hubungan Innustrial, Mogak Kerja dan Penutupan Berashacu yang Gerushaan yang Gerushaan yang Berakipasteriya kanggotaan politikasi dan Rekapitulasi keanggotaan politikasi dan Rekapitulasi keanggotaan politikasi dan Berakipasi Anguasha Fecerasi Bahangan Relakipasi Serikat Romania Kerjasanan Operasional Doeran Kabupaser/Kora Lembuso Kerjasanaan Pelakipasanaan Pelakipasanaan Pelakipasan Renjasanaan Pelakipasanaan Pelakipasanaan Pelakipasanaan Pelakipasanaan Pelakipasanaan Pelakipasanaan Pelakipasanaan Pelakipasan Berakipasanaan Pelakipasanaan Pelakipasanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaan						
Kerja dan Penuapan Bersahaan yang Bershipad/Berdampak di 1 Bersahaan yang Bershipad/Berdampak di 1 Bersahaan Akapusten/Kota Cognitas Pangusaha, Federal Bekarjatus Kenggoban Pada Bekarjatus Kenggoban Pada Bekarjatus Kenggoban Tripadit Pelaksanaan Operasional Lembasus Kerjasan Pelaksanaan Repersional Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Repersionaan Repersionaan Pelaksanaan Repersionaan Repersiona						
Perusahagan yang Berakibac/Perdampak di 1 (setu) Dascrih Kebupaten/Nota Rekaphulasi Keanggotaan Poda Doganisasi Gangalan Poda Doganisasi Gangalan Poda Doganisasi Gangalan Poda Doganisasi Gangalan Poda Rekaphulasi Keanggotaan Poda Doganisasi Gangalan Doganisasi Doganisasi Gangalan Doganisasi Doganisasi Gangalan Doganisasi Doganisasi Gangalan Doganisasi Gangala						
Berakibat/Berdampak di 1 Suru) Dacoh Kabupaten/Kota Rehapitulari keangotaan Poda Rehapitulari kerjasana Triparit Daman Kabupaten/Kota Daman Kabupaten/Kota Pekerja Reparati Bidang Rehapitulari keterampilan Pekerja Retanagak-rjaan Retanag						
(setu) Pacron Rebugatery/Note Rekaphulasi Kengqustan Pada An Konfederasi Serikat Daminan Sasial Tenaga Kerja Cheleng/Serian Biruth Setta Chelengaman Habupaten/Kora Chelengaman Habupaten/Kora Chelengaman Habupaten/Kora Chelengaman Habupaten/Kora Chelengaman Habupaten/Kora Chelengaman Habupaten/Kora Chelengaman Habupatery Chelengaman Chelengama						
5. Penyeleng araan Verifikasi dan Rekapitulasi kesapadahan Poda Grambasia Pengusaha, Federesi Genkat dan Konfederasi Serikat Pelekerja/Seria Buruh Serta Bendapasah Asilasa Lambada Kalasan Pelaksanaan Damana Sosial Tenaga Karja Jamican Sosial Tenaga Karja Pekerja dan Pelahitan Kesapanteraan Pemberdasarkan Pengunah Pen						
Rehaphulosi Kenanggotaan Pada dan Kontretensi Serikat Dropanisasi Pagusaha, Federasi Rehaphulosi Serikat Dropanisasi Pagusaha, Federasi Rohardari Serikat Dropanisan Pelaksanaan Deman Kabupaten/Kora dan Belaksanaan Danimun Sosial Tengati Kerja Deman Kerja Bidang Deman Belaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Deman Belaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Deman Belaksanaan Deman Belaksanaan Deman Belaksanaan Deman Belaksanaan Danimun Belaksan		5.				
Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konferberosi Serikat Pelekerajasi Puruh Seria Pelekerajasi Puruh Seria Lembsua Kerjasama Triparitit Daman Kabupaten/Kota Laminan bosial Tengati Keda Jaminan Pelaksanaan Daman Pelaksanaan Pelekerja Bidang A. Pelekarian Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pelekerja Bidang A. Pelaksan Kesempatan Kerja Bidang A. Pelaksan Resembatan Kerja Migrah Indonesia (PMI) Pekerja Pembergunan Kapala Bidang A. PAKHSAN R. S.Sos Bidang A. Penylapar Bidang Bidang A. Penylapar Bidang						
Pekerja/Serivat Buruh Serta Non Afilies 6. Petaksanean Operasional Leanbasa Kerjasama Tripertit Leanbasa Kerjasama Tripertit Leanbasa Kerjasama Tripertit Jaminan Sosial Tengga Kede Jaminan Sosial Tengga Kede Jaminan Sosial Tengga Kede Leanbardayaan Pekerja Rependeranga Pendidikan Leanbardayaan Pekerja Bedasarkan Leanbardayaan Ambardayaan Permukinan Permuk						
Non Afiltesi 6. Petaksaraan Operasional Lembaus Kerjasama Tripartit Daman Kashanaan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jaminan Senaga Kerja Jaminan Se	dan Konfederasi Serikat					
6. Peraksanaan Operasionali Lembaso Kerjasama Triparitt Daminan Sosial Teraga Kerja Jaminan Sosial Teraga Kerja Jaminan Sosial Teraga Kerja Jaminan Sosial Teraga Kerja Pekerja Pekerja An Pekerja An Pekerjaan Pendidikan Pemberdayaan Alaster Kompetensi Alaster Kompetensi Alaster Kompetensi An Peringkatan Dan Bimbingan An Peningkatan Pelindungan dan Penyediaan An Peningkatan Pelindungan dan Migran Indonesia (PMI) An Penibangunan						
Lembsus Kerjasama Tripartit Darran Kabupaten/Kora Darran Kabupaten/Kora Darran Kabupaten/Kora Daminan Sosial Tenaga Kerja Daminan Sosial Tenaga Kerja Dekerja Dekerja Dekerja Demberdayean Pemberdayean Pemberdayaan Pemberdayaan Daj Pencari Kerja berdasarkan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Daj Pencari Kerja berdasarkan Daj Pencari Kerja berdasarkan Daj Pencari Kerja Daja berdasarkan D	Non Afiliasi					
Lembsus Kerjasama Tripartit Darran Kabupaten/Kora Darran Kabupaten/Kora Darran Kabupaten/Kora Daminan Sosial Tenaga Kerja Daminan Sosial Tenaga Kerja Dekerja Dekerja Dekerja Demberdayean Pemberdayean Pemberdayaan Pemberdayaan Daj Pencari Kerja berdasarkan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Daj Pencari Kerja berdasarkan Daj Pencari Kerja berdasarkan Daj Pencari Kerja Daja berdasarkan D						
Descript Kabupaten/Kota 2. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jaminan Pelaksanaan Pendidikan Kebanagakerjaan Kebanagakerjaan Jabatan Belmbingan Jabatan Belmbingan Jabatan Belmbingan Jabatan Belmbingan Jabatan Belmbingan Jaminan Bencari Kerja Penyalaan Bencari Kerja Jaminan Bencaran Pelaksan Jaminan Bencaran Pelaksan Jaminan Penyalaan Jaminan Pelaksanan Pelaksanan Jaminan Pelaksan Jaminan Pelaksanan Jaminan Pelaksan Jaminan Pelaksanan Jaminan Pelaksanan Jaminan Pelaksan Jaminan Pelaksanan Jaminan Pelaksanan Jaminan Pelaksan Jaminan Pelaksanan Jaminan Pelaksan Jaminan Pelaksanan Jaminan Pelaksanan Jaminan Pelaksan Jaminan Pelaksanan Jaminan Pelaksan Jaminan Pelak						
7. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitar Kesajanteraan Pekerja Kepala Bidang Linformasi Pencari Kerja berdasarkan Ketanagakerjaan Ketanagakerjaan Ketanagakerjaan Jabatan bagi Pencari Kerja Pentungan dan Pengempatan Kerja Jabatan bagi Pencari Kerja Jabatan bagi Pencari Kerja Peringkatan Pelindungan dan Informasi Pasar Kerja Online Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Pengempanan Kawasan Repiabangunan Kawasan dan Pengempanan Kawasan Pengempanan Kamanan						
Jamman Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitar Kesajanteraan Pekerja Pekerja Bidang Li Proses Pelakasanaan Pendidikan Pemberdayaan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Ketanagakarjaan Bidang Li Proses Pelakasaraan Pendidikan Bidang Bidang Li Perjuutan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Perjayanan dan Berpidiaan Linformasi Pesar Kerja Online Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Penyabangunan Kepala Bidang Li Identifikasi Potensi Kawasan Kepanandan Permukiman	Dark sit Nanebaren/korg					
Jamman Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitar Kesajanteraan Pekerja Pekerja Bidang Li Proses Pelakasanaan Pendidikan Pemberdayaan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Ketanagakarjaan Bidang Li Proses Pelakasaraan Pendidikan Bidang Bidang Li Perjuutan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Perjayanan dan Berpidiaan Linformasi Pesar Kerja Online Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Penyabangunan Kepala Bidang Li Identifikasi Potensi Kawasan Kepanandan Permukiman						
dan Fasilitas Kesejanteraan Pekerja H. UMAR, ST, M.S. Kepala Bidang RIP.19730714 200003 1 002 Retanagakarjaan Setanagakarjaan Can Pelakhan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Kaster Kompetensi Penyuluhan dan Bimbingan A. Pelayanan dan Penyediaan Bidang Repala Bidang Repa	Pengembangan Pelaksanaan					
H. UMAR, ST, M.Si Kepala Bidang dan Pelatihan Keterampilan dan Pelatihan Keterampilan berapakarjaan ketenagakarjaan ketenagakarjaan dan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Dabatan bagi Pencari Kerja Jabatan bagi Pencari Kerja Informasi Pasar Kerja Online Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Hermbangunan Kawasan Permukiman Perm						
H. UMAR, ST, M.S. Repala Bidang NIP,19730714 200003 1 000 Retanagakurjaan Retanagakurjaan 2. Penyujuhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Babatan bagi Pencari Kerja Jabatan bagi Pencari Kerja Perluasan Kesempatan Kerja Perluasan Kesempatan Kerja Romperensi Caton Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Kaylasan dan Raylasan dan Permukiman						
MIP,19730714 200003 1 002 Retenagakerjaan Ketenagakerjaan 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jabatan bagi Pencari Kerja Jabatan bagi Pencari Kerja Perluasan Kesempatan Kerja 4. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Peningkatan Pelindungan dan Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Reversan dan NIP. 19800807 200103 1 002 Penyebasan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan	Pekerja					
MIP,19730714 200003 1 002 Retenagakerjaan Ketenagakerjaan 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jabatan bagi Pencari Kerja Jabatan bagi Pencari Kerja Perluasan Kesempatan Kerja 4. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Peningkatan Pelindungan dan Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Reversan dan NIP. 19800807 200103 1 002 Penyebasan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan	Proces Polycesson Pandidica		Konsia Didaga	TT M C	CAMIL II	
Replace Bidang 1. Repetensi Penyujuhan dan Bimbingan 2. Penyujuhan dan Bimbingan 3. Perluasan Kesempatan Kerja 4. Pelayanan dan Penyediaan 5. Peningkatan Palindungan dan Penyediaan 6. Peningkatan Palindungan dan Penyediaan 7. Peningkatan Palindungan dan Penyediaan 8. Peningkatan Palindungan dan Pekerja 8. Peningkatan Palindungan dan Pekerja 9. Penyediaan Palindungan 1. Penyediaan Palindungan 1. Penmanganan 1. Penmanganan 1. Penmanganan 1. Penmanganan 1. Penmanganan 2. Penyediaan Tanah untuk 3. Penyediaan Tanah untuk 4. Pelayanan Palindungan 5. Penyediaan Tanah untuk 6. Penyediaan Tanah untuk 6. Penyediaan Tanah untuk 7. Penyediaan Tanah untuk 8.						
Kayala Bidang 4. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 4. Pelayanan dan Penyediaan Jinformasi Pasar Kerja Online Jinformasi Pasar Kerja Online Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Penyiapan A. RAKHSAN R. S.Sos Kepala Bidang J. Identifikasi Potensi Kawasan Kaviasan dan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Kawasan 2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan						
Jahatan bagi Pencari Kerja 2 Perluasan Kesempatan Kerja 4. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 4. RAKHSAN.R. S.Sos Kepala Bidang A. RAKHSAN.R. S.Sos Kepala Bidang Migran Indonesia (PMI) Kaviasan dan Kaviasan dan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Kawasan 2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan						
Jahatan bagi Pencari Kerja 2 Perluasan Kesempatan Kerja 4. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 4. RAKHSAN.R. S.Sos Kepala Bidang A. RAKHSAN.R. S.Sos Kepala Bidang Migran Indonesia (PMI) Kaviasan dan Kaviasan dan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Kawasan 2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan						
Perluasan Kesempatan Kerja Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Informasi Pasar Kerja Online Komperensi Calon Pekerja Komperensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Penyiapan Informasi Potensi Kawasan Fransmigrasi Permukiman		.2.				
4. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online S. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Penyiapan NIP. 19800807 200103 1 002 Penmekiman Permukiman	Jabatan bagi Pencari Kerja					
4. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online S. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Penyiapan NIP. 19800807 200103 1 002 Penmekiman Permukiman	Dorlings Vacamatan Varia					
Informasi Pasar Kerja Online 5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 4. RAKHSAN.R, S.Sos Kepala Bidang I. Identifikasi Potensi Kawasan Penyiapan Kawasan dan Kawasan dan Pembangunan Pembangunan Penmbangunan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan	person reactifications and	3.0				
Informasi Pasar Kerja Online 5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 4. RAKHSAN.R, S.Sos Kepala Bidang I. Identifikasi Potensi Kawasan Penyiapan Kawasan dan Kawasan dan Pembangunan Pembangunan Penmbangunan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan	Pelavanan dan Penyediaan	4.				
5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 4. RAKHSAN.R, S.Sos Kepala Bidang 1. Identifikasi Potensi Kawasan Penyiapan Kawasan dan Kawasan dan Pembangunan Pembangunan Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan						
Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja 4. RAKHSAN.R. S.Sos Kepala Bidang I. Identifikasi Potensi Kawasan NIP. 19800807 200103 1 002 Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pembangunan Permukiman Pembangunan Kawasan						
Migran Indonesia (PMI)/Pekerja 4. RAKHSAN.R, S.Sos Kepala Bidang NIP. 19800807 200103 1 002 Penyiapan Transmigrasi Rawasan dan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Transmigrasi Transmigrasi 2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan						
4. RAKHSAN.R, S.Sos Kepala Bidang 1. Identifikasi Potensi Kawasan NIP. 19800807 200103 1 002 Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Permukiman Transmigrasi Transmigrasi 2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan						
4. RAKHSAN.R, S.Sos Kepala Bidang 1. Identifikasi Potensi Kawasan NIP. 19800807 200103 1 002 Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Permukiman Transmigrasi 2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan						
NIP. 19800807 200103 1 002 Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan	Migran Indonesia (PMI)					
NIP. 19800807 200103 1 002 Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan	Identifikasi Ootensi Kawasan		Vanala Didana	202.2 0	DAMENT	1
Kaviasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan						
Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan	took teen the site			200 2 000000 (00)	200K I . 1171	
Permukiman Transmigrasi 2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan						
2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan						
Pembangunan Kawasan			Transmigrasi			
		.5				
Transmigrasi						
	Transminordi					
	เคราส์แนะเฮาา					

+ = =

1.				
	,		3.	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
			4.	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			6.	Penyuluhan Transmigrasi
5.	DARFAN HUSAIN, SP NIP. 19771122 200701 1 013	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman
			2.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman

KEPALA DINAS

KAMAL RASYID, S.STPPangkat :Pembina Utama Muda
NIP: 19810511 199912 1 002

Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	3.			
Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Duera!) Nabupaten/Kofa				
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunah Transmigrasi yang Berasal dari L (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Pényuluhan Transmigrasi				
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	1.	Kepala Bidang Fengembangan Kawasan Transmierasi	DARFAN HUSAIN, SP NIP. 19774122 200701 1 013	
Penguntan Infrastruktur Sosial, Ekonomi den Kelembagaan Galum rangka Kemandirian Satuan Permukiman				

KEPALA DINAS

kawas rasyin, s.srp Fengler: Peabirs Vitama Muds NIP- (981051) 139912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435 **M A L I L I, 92981**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK)
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur pada Bada Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menujuk/menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada point 1, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 90);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

(1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

KEDUA

- : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
 - Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan dan sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan; dan

- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan,
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan: dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan dan Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

: Tugas dan kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Memverifikasi surat pertanggungjawaban keuangan.
- 3. Membuat laporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- 4. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di tahun perencanaan selanjutnya.

KELIMA

: Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEMPAT di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Malili

Pada Tanggal

DAN ASET DAERAM

: 03 Januari 2022

TAH KABUSKEPALA BADAN, BADAN KEUANGAN

CDr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

Pangkat Pembina Tk.I NIP 19700814 200212 1 006 Lampiran 1

: Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Tahun 2022

Tanggal

: 03 Januari 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	KEGIATAN
1	2	3	4
1.	AWALUDDIN ANWAR, S.STP	Sekretaris	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.	Nip.19810402 199912 1 001		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Nip.13010 lo2 133312 2 002		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
			6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			9. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		1/ 1/14 A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2.	JUMARTHI ACHMAD,S.Pt	Kabid Anggaran	1. Roofdinasi dan Ferryasanan Kensana Anggaran Basian
	Nip. 19771230 200803 2 001		
3.	ZAKI JUHDAN,S.Pd	Kabid Perbendaharaan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
<u>J.</u>	Nip.19781002 200604 1 010		
			1 1/2 II and an Deleksannan Alumbansi dan Delenguan Kaupanan Daerah
4.	YUSRAM,SE	Kabid Akuntansi	Koordinas dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Nip. 19801029 200502 1 004		

No	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	KEGIATAN
	SYAMSUL RISAL,SE	Kabid Pengelolaan	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Nip.19750609 200902 1 003		

Malili, 03 Januari 2022 EKEPALA BADAN,

BADAN KEUANGAN DANASET DAERAH DANASET DAERAH Pangkat Pembina Tk.I Nip. 19700814 200212 1 006

Lampiran II: Keputusan Kepala BadanKeuanganDan AsetDaerah Kabupaten Luwu Timur

Nomor : Tahun 2022 Tanggal : 03Januari 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA	NIP	JABATAN
1	RACHMAWATI,SE	19760726 200604 2 020	Penatausahaan Keuangan

KEPALA BADAN,

Dr.RAMADHAN PIRADE, SE, MM

Pangkat . Pembina Tk.I

Nip. 19700814 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN TOWUTI

Alamat : Jl. Veteran No. 03 Langkea Raya

KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS (PPTK) PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT TOWUTI,

Menimbang

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu Menetapkan Keputusan Camat tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Towuti Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 80);
- Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3 / F-04 / I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4 / F-04 / I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU

Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Towuti Tahun Anggaran 2022 dengan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEDUA

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Towuti

pada tanggal

: 3 Januari 2022

CAMAT TOWUTI

Drs. SAENAL

Pangkat: Pembina Tk.I/ IVb Nip. 19700708 199402 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI NOMOR : ØLTAHUN 2022 TANGGAL : 3 JANUARI 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KANTOR KECAMATAN TOWUTI TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN PENANGGUNGJAWABIPPTK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Deerah Kinerja Perangkat Daerah Kabupatenrikota Rabupatenrikota Administrasi Reuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Administrasi Barang Milik Daerah pada Penyasunan Dokumen Perencanaan Perangkat Penyusunan Dokumen Perangkat Roordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Roordinasi dan Penyusunan Dokumen Penangkat Daerah Roordinasi dan Penyusunan Dokumen Penangkat Dokumen RKA-SKPD Roordinasi dan Penyusunan Dokumen Penangkat Dokumen RKA-SKP
PROGRAM enunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Δ.

WIWIK INDARWATI, S.Sos PENATA MUDA Tk. I / IIIb NIP. 19641231 200604 2 073		HADIRA, S.Sos PENATA MUDA Tk. I / IIIb NIP. 19830410 201412 2 001		WIWIK INDARWATI, S.Sos PENATA MUDA Tk. I / IIIb NIP. 19641231 200604 2 073					
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	naoupatennota					
			7	_					

		WIWIK INDARWATI, S.Sos PENATA MUDA TK. I / IIIb NIP. 19641231 200604 2 073					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota			

RAMLAH MDS, ST PENATA / IIIC NIP. 198206302011012012	IDARIATI LAINUS, SE PENATA TKI/IIId	NIP. 19770419 200312 2 005	200 O ITANAIGACIAI VIIMAIA	WIWIK INDARWATI, 9.308 PENATA MUDA TK. I / IIIb NIP. 19641231 200604 2 073		SARCE YULIANA, SE PENATA TK. I/IIId NIP 19730701 200801 2 009
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
2		ю		4		

SARCE YULIANA, SE PENATA TK. I/IIId	INIP. 19730701 200801 2 009	IDARIATI LAINUS, SE PENATA TK://IIId	INIT. 181 Oct 15 FOOD					
nesa dan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Peraturan Peraturan Kepala Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdecaan di Wilayah Kecamatan						
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
		9						

CAMAT TOWUTI,

Drs. SAENAL Pangkat : Pembina Tk I Nip : 19700708 199402 1 001